



**BANTUAN AMERIKA SERIKAT KEPADA INDUSTRI FILM
HOLLYWOOD: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**

(The United States Assistance to the Hollywood Movie Industry: The Political
Economy Perspective)

SKRIPSI

Oleh :

Yudith Ayu Rokhmah

NIM 160910101033

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**BANTUAN AMERIKA SERIKAT KEPADA INDUSTRI FILM
HOLLYWOOD: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**

(The United States Assistance to the Hollywood Movie Industry: The Political
Economy Perspective)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Yudith Ayu Rokhmah

NIM 160910101033

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Seluruh keluarga dan kerabat;
2. Almamater Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Dukungan tiada henti secara langsung dari Cahyo, Tiara, dan Cindy;
4. Executive Board AIESEC in UNEJ 2018;
5. Teman-teman sedari Sekolah Menengah Atas;
6. Teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional Angkatan 2016;
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuan tenaga dan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

“Even miracles take a little time”

-Cinderella (2015)-



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudith Ayu Rokhmah

NIM : 160910101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Bantuan Amerika Serikat kepada Industri Film Hollywood: Perspektif Ekonomi Politik”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, mengenai kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan dalam penulisan penelitian saya, merupakan kutipan yang diperoleh melalui sumber-sumber yang sah dan dapat diakses atau diketahui. Skripsi yang saya tulis belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab dengan semua keabsahan dan kebenaran hasil penelitian saya dengan sesuai kaedah ilmu pengetahuan dan tanggung jawab akademik yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas rasa kesungguhan, dengan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, serta bersedia menerima sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini dianggap tidak benar.

Jember, 21 September 2020

Yang Menyatakan

Yudith Ayu Rokhmah

NIM 160910101033

SKRIPSI

**BANTUAN AMERIKA SERIKAT KEPADA INDUSTRI FILM
HOLLYWOOD: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**

(The United States Assistance to the Hollywood Movie Industry: The Political
Economy Perspective)

Oleh

YUDITH AYU ROKHMAH

NIM 160910101033

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Iqbal, S. Sos, M. Si
Dosen Pembimbing Anggota : Suyani Indriastuti, Ph. D.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Bantuan Amerika Serikat kepada Industri Film Hollywood: Perspektif Ekonomi Politik**” karya Yudith Ayu Rokhmah telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Oktober 2020
Waktu : 09:00 WIB-Selesai
Tempat : Sidang Online

Tim Penguji,
Ketua

Dr. Puji Wahono, M.Si
NIP 196002011987021001

Anggota I

Anggota II

Agus Trihartono, S.Sos, MA., Ph.D.
NIP 196908151995121002

Drs. Agung Purwanto, M.Si.
NIP 196810221993031002

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Amerika Serikat (AS) merupakan negara superpower, yaitu negara dengan kekuatan militer, politik, dan ekonomi dalam dunia global. Kekuatan AS stabil dengan jangka waktu yang panjang, sehingga berpengaruh bagi negara-negara lain. Salah satu sumber kekayaan AS juga berasal dari sektor Art and Entertainment. Didalam sektor tersebut, industri film Hollywood merupakan salah satu yang memiliki peran penting. Pemerintah terbukti memberikan bantuan kepada industri film Hollywood. Bantuan yang diberikan adalah berupa peralatan militer, akses pada ruang privat pemerintah, hingga bantuan pemberian masukan dari tokoh ahli. Tidak semua pembuat film dapat menikmati akses yang sama, karena pemerintah menginginkan timbal balik dari diberikannya bantuan tersebut.

Bantuan tersebut melanggar prinsip Freedom of Speech pada amandemen pertama Konstitusi AS dan merusak perekonomian yang berdasarkan pada prinsip liberalisme. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mencari alasan dibalik pemberian bantuan kepada industri film Hollywood oleh Pemerintah AS. Penulis menggunakan konsep ekonomi politik kritis untuk mencari jawaban dari permasalahan. Serta penulis menggunakan konsep propaganda untuk menjelaskan jawaban penelitian. Data yang digunakan berasal dari data sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan alasan pemerintah AS memberikan bantuan terhadap industri film Hollywood yang pertama sebagai media iklan produk dalam negeri AS. Kedua, sebagai alat untuk mempertahankan citra baik AS. Terakhir adalah sebagai alat penyebaran ideologi AS pada dunia global. Ketiga alasan tersebut merupakan propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah AS. Propaganda tersebut dilakukan dengan melakukan mengubah atau penyesuaian naskah atau adegan dalam film. Pada akhirnya propaganda tersebut akan menjadi penghubung antara kepentingan politik Pemerintah AS dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dari industri film Hollywood. Sementara itu, masyarakat global hanya menerima 'residu' dari proses tersebut.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bantuan Amerika Serikat kepada Industri Film Hollywood: Perspektif Ekonomi Politik”. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng selaku Pimpinan Rektor Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Djoko Poernomo, M.Si. selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Bapak Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Suyani Indriastuti, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, pengetahuan, dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Linda Dwi Eriyanti, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Seluruh Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Sahabat dan teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi menciptakan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 21 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.4 Batasan Materi	5
1.4.1 Batasan Waktu	5
1.4.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1 Konsep Ekonomi Politik	6
1.5.2 Konsep Propaganda.....	8
1.6 Argumen Utama	12
1.7 Penelitian Terdahulu	13
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Jenis Penelitian	14
1.7.2 Teknik pengumpulan data	14
1.7.3 Teknik Analisis Data.....	15
1.8 Sistematika Penulisan	15

BAB II INDUSTRI FILM HOLLYWOOD DALAM KONSTELASI EKONOMI POLITIK AMERIKA SERIKAT	17
2.1 Sejarah Singkat Perkembangan Industri Film Hollywood	17
2.2 Konstelasi Industri Film Hollywood	18
2.2.1 Pemerintah Amerika Serikat.....	19
2.2.2 Korporasi Industri Film Hollywood.....	25
BAB III BENTUK BANTUAN AMERIKA SERIKAT KEPADA INDUSTRI FILM HOLLYWOOD	32
3.1 Fenomena yang terdapat dalam Industri Film Hollywood	32
3.1.1 Oligopoli.....	32
3.1.2 Bantuan oleh Pemerintah AS	35
3.2 Film yang Mendapat Bantuan dari Amerika Serikat	37
3.3 Film yang Permintaan Bantuannya Ditolak oleh Amerika Serikat	43
BAB IV ALASAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA INDUSTRI FILM HOLLYWOOD	45
4.1 Model Propaganda Amerika Serikat dalam Film Hollywood.....	46
4.2 Propaganda sebagai Alasan Pemberian Bantuan Kepada Industri Film Hollywood	51
BAB V KESIMPULAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik produksi film yang didampingi oleh departemen pertahanan tahun 1915-201523

Gambar 2.2. 25 Film pedapatan teratas *Box Office US/Canada* 201827

Gambar 2.3. Pendapatan Bioskop Global dan Hiburan Film dari Rumah 2018 (Milyar Dolar AS)28

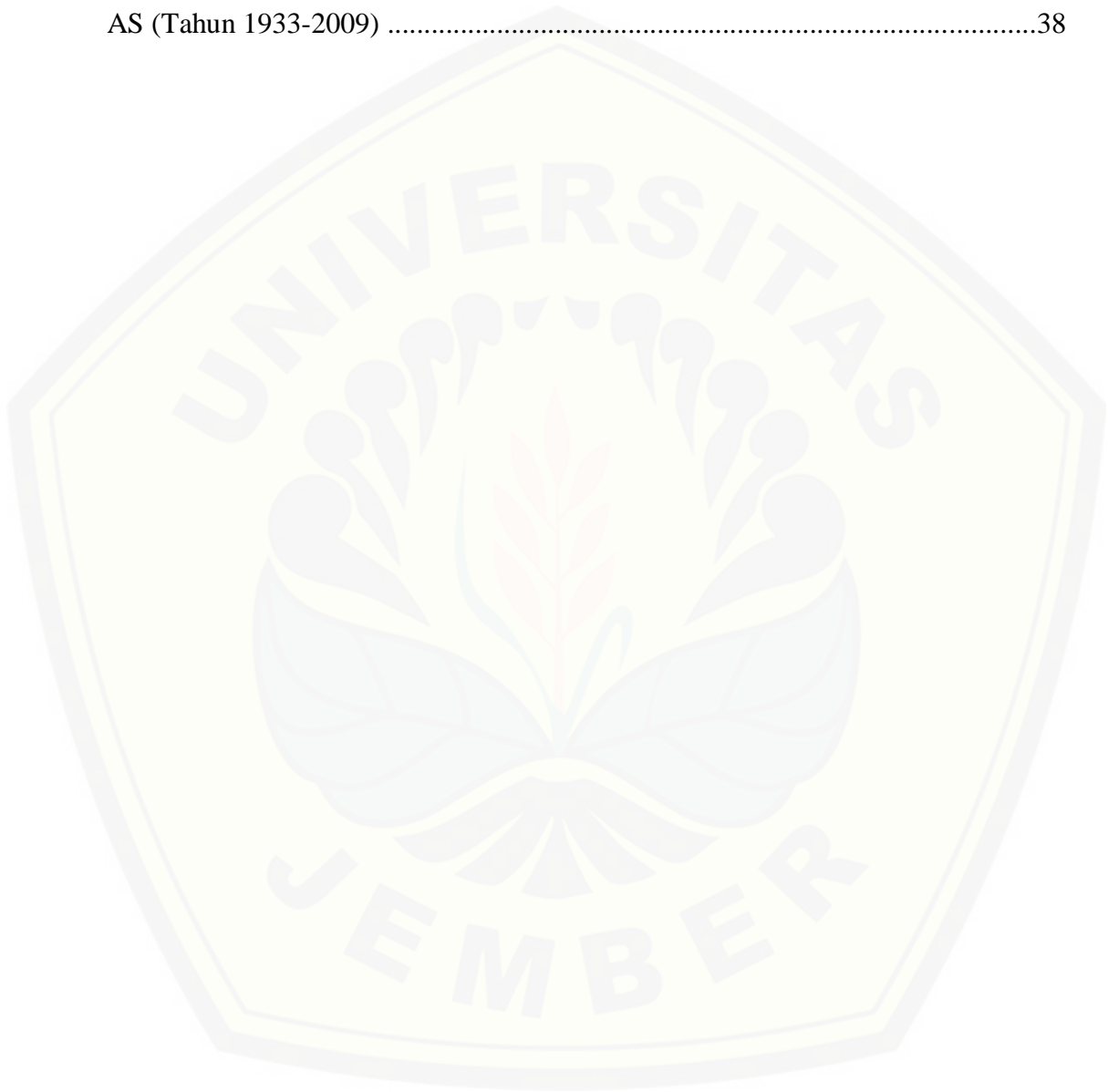
Gambar 2.4. Pendapatan Bioskop Global dan Hiburan Film dari Rumah 2018 (pembagian %)29

Gambar 4.1. Bagian dari catatan pada naskah *Hawaii Five-0* pada episode pilot oleh Angkatan Darat AS52

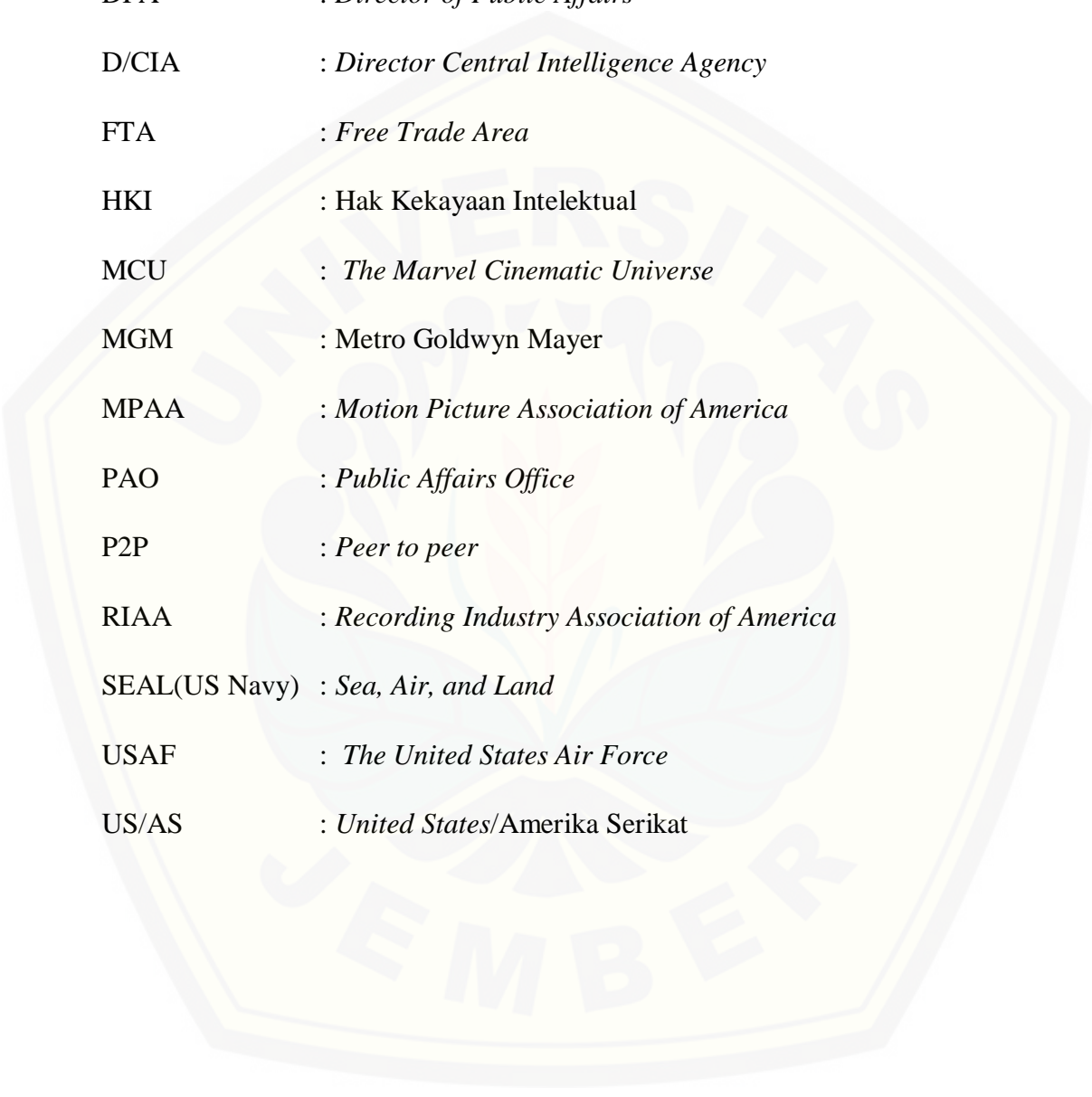
Gambar 4.2. Kutipan dari catatan naskah USMC tentang film Hulk menguraikan perubahan ‘radikal’, departemen pertahanan meminta pengaturan karakter tokoh dan jalan cerita untuk menghilangkan unsur militer pangkalan gurun tempat eksperimen berbahaya yang tidak sengaja menciptakan karakter Hulk54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Film yang Mendapatkan Bantuan dari Departemen Pertahanan
AS (Tahun 1933-2009)38



DAFTAR SINGKATAN



CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
DPA	: <i>Director of Public Affairs</i>
D/CIA	: <i>Director Central Intelligence Agency</i>
FTA	: <i>Free Trade Area</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
MCU	: <i>The Marvel Cinematic Universe</i>
MGM	: Metro Goldwyn Mayer
MPAA	: <i>Motion Picture Association of America</i>
PAO	: <i>Public Affairs Office</i>
P2P	: <i>Peer to peer</i>
RIAA	: <i>Recording Industry Association of America</i>
SEAL(US Navy)	: <i>Sea, Air, and Land</i>
USAF	: <i>The United States Air Force</i>
US/AS	: <i>United States/Amerika Serikat</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) merupakan negara dengan kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang memungkinkan negara-negara lain dapat dengan terpaksa mengikuti hal-hal sesuai keinginan AS. Hal tersebut membuat AS dijuluki sebagai negara *superpower*. Kekuatan AS memiliki sifat stabil dengan jangka waktu panjang, sehingga AS dapat memiliki pengaruh besar bagi negara-negara lain (Rosefielde & Mills, 2007). Dalam hal ekonomi, AS merupakan kunci dari sistem finansial global. Pada laporan tahun 2015, lebih dari 80% dari semua transaksi keuangan di seluruh dunia dilakukan dalam dolar. Selain itu juga transaksi pasar mata uang asing dengan jumlah 87% (Bremmer, 2015). Oleh karena itu, untuk mempertahankan hegemoni AS tetap stabil, negara tersebut membutuhkan instrumen propaganda dan pembentuk opini yang dapat dengan mudah diterima masyarakat dunia. Salah satu instrumen tersebut adalah industri film Hollywood.

Kekayaan AS berasal dari pendapatan yang dihasilkan berbagai sektor. Salah satu sektor tersebut adalah dari *Art and Entertainment*. Pada tahun 2017, sektor tersebut menyumbang sebesar 4 persen pendapatan AS dan menempati posisi ke-11 industri terbesar di AS (Sawe, 2017). Di dalamnya, terdapat industri film global yang didominasi oleh industri film AS yaitu Hollywood¹. Terdapat enam studio besar (Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal, dan Warner Brothers) yang mampu menghasilkan \$ 22,4 miliar dari total *box office*² global yang diambil sebesar \$38,6 miliar (Moody, 2017). Dengan jumlah pendapatan besar yang diperoleh tersebut, diduga pemerintah AS tidak hanya melakukan proteksi, namun juga kontrol ketat dan sangat terlibat dalam tata kelola kebijakan industri film Hollywood.

¹ "Hollywood" merupakan nama untuk mendeskripsikan industri film Amerika Serikat. Nama tersebut berasal dari nama kawasan yang berada di Los Angels, California **Invalid source specified.**

² "Box office" menurut Collins Dictionary adalah tempat dimana tiket pertunjukan teater, film, atau konser yang terjual. Arti yang lebih luas dalam masyarakat adalah tingkat keberhasilan dari film dalam hal jumlah orang yang melihatnya atau dari jumlah pendapatan yang diperoleh film tersebut **Invalid source specified.**

Dominasi industri film Hollywood AS dalam pasar global sangat kuat. Setidaknya setengah hingga dua pertiga dari total penerimaan *box office* di negara-negara asing dikuasai oleh film-film Amerika (Scott, 2002). Keberhasilan yang diterima dari pasar ekspor tersebut bukan hanya berasal dari korporasi media multinasional AS yang pandai dalam menyebarluaskan produk-produk Hollywood ke seluruh negara, tapi juga karena kemampuan mereka memberikan film yang dapat menarik kuat selera penonton dengan membuat film-film beranggaran besar. Namun demikian, ternyata di balik dominasi Hollywood tersebut, pemerintah AS memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk tertentu kepada industri film Hollywood.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Bantuan tersebut yang diberikan oleh negara dapat merusak pasar bebas yang terbentuk dalam perekonomian. Dalam sudut pandang liberalisme, kebebasan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan untuk kemakmuran manusia. Liberalisme ekonomi banyak didukung oleh berbagai negara. Terutama adalah AS, yang juga merupakan salah satu pelopor liberalisme ekonomi dunia. Namun beberapa tahun terakhir ini kebebasan ekonomi di negara tersebut justru ditemukan menurun (Mitchell, 2012). Salah satu bentuk penurunan kebebasan ekonomi atau liberalisme di AS adalah diberikannya bantuan-bantuan terhadap pihak tertentu. Tidak hanya dalam bentuk ekonomi tetapi juga dalam bentuk dukungan politik.

Melalui Biro Investigasi Federal AS yaitu CIA, AS melancarkan dukungannya. Pada akhir tahun 1950-an, CIA membiayai distribusi film-film asing daerah-daerah di berbagai dunia yang rentan terhadap komunisme. Pada tahun 1958, CIA membiayai penyebaran “rosary films” yang berbahasa Spanyol Peyton. “Rosary film” merupakan film yang mendukung agama Katolik, persatuan keluarga, dan doa. Film tersebut dipilih karena menanamkan unsur agama yang kuat dalam masyarakat yang dapat melawan komunisme. DCI Allen Dulles dan Wakil Presiden Richard Nixon memberikan bantuan sebesar US\$ 20.000.

Lebih dari satu per lima film yang menggambarkan penerapan pasukan militer AS dari tahun 1991 hingga 2002 mendapat pembiayaan dari Pentagon

(Department of Defense). Lima film bahkan mendapat dukungan penuh, yaitu *True Lies* (1994), *Air Force One* (1997), *Rules of Engagement* (2000) dan *Black Hawk Down* (2002). Termasuk dua film yang mendapat dukungan signifikan dari CIA yaitu *The Recruit* (2003) dan *Charlie Wilson's War* (2007) (Alford, 2009).

Selain bantuan dana yang diberikan, pemerintahan AS juga memberikan dukungan berupa akses ke ruang privat pemerintahan. Seperti contohnya Pentagon memberikan pinjaman berbagai alat militer yang dimiliki sebagai properti film, hingga memberikan akses kepada informasi-informasi rahasia yang tidak sembarang orang dapat melihat. Pemerintah AS telah bekerja di balik layar perfilman pada lebih dari 800 film utama dan juga lebih dari 1000 judul TV. Namun timbal baliknya adalah pemerintah AS juga ikut terlibat dalam pembuatan film, seperti melakukan perubahan pada naskah film tersebut. Bahkan pada film besar dan populer Hollywood diantara lain James Bond, serial Transformers, juga film-film dari dunia sinematik Marvel dan DC (Secker & Alford, 2017).

Keikutsertaan pemerintah AS dalam pembuatan film dan perubahan naskah merupakan salah satu syarat utama agar film dapat mendapat bantuan dari pemerintah. Kepentingan antara kedua pihak dipertemukan, sehingga pemerintah AS menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan propaganda kepada publik. Propaganda adalah penyebaran informasi (dalam hal ini adalah fakta, argumen, setengah kebenaran, atau kebohongan) untuk mempengaruhi opini publik (Smith, 2020). Upaya ini dapat menentang fakta-fakta sejarah yang semula akan ditampilkan dalam sebuah film. Dibandingkan negara lain, propaganda yang dilakukan pemerintah AS terutama oleh pihak militer merupakan propaganda yang paling canggih dan sukses di dunia. Fakta yang didapatkan dalam hal ini, beberapa hal dalam film tidak dibentuk oleh pertimbangan seni atau sejarah melainkan dengan paksaan (Robb, 2004).

Dengan adanya pihak yang diuntungkan dengan bantuan tersebut, tentu dibaliknya terdapat juga pihak yang tidak mendapat keistimewaan. Dalam catatan laporan film-film yang meminta bantuan kepada departemen pertahanan AS, terdapat berbagai film yang permintaan bantuannya ditolak. Kebanyakan penyebab dari ditolaknya permintaan film tersebut karena pembuat film tidak bersedia untuk

mengikuti keinginan departemen pertahanan AS seperti perubahan pada naskah atau adegan pada film. Seperti pada salah satu film yang berjudul *Independence Day* (1996) permintaan bantuannya ditolak karena tidak adanya fleksibilitas dari produser, penulis, atau sutradara film dalam pembuatan film tersebut. Dalam film tersebut, militer AS digambarkan tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk dapat memerangi ancaman alien.

Tindakan yang dilakukan pemerintah AS dalam kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya melanggar prinsip dari liberalisme AS itu sendiri. Prinsip tersebut yang tertera pada amandemen pertama aturan AS yaitu *Freedom of Speech* (Ruane, 2014). Pernyampaian pendapat, fakta, ataupun argumen dalam film juga merupakan hak yang seharusnya dapat dirasakan pihak manapun secara bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman khususnya oleh pemerintah. Penelitian ini lebih fokus pada sisi bantuan pemerintah AS yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS, khususnya bagi pandangan liberalisme. Amandemen Pertama berarti bahwa pemerintah tidak dapat mendiskriminasi satu pandangan tertentu atas pandangan lain (Jenkins, 2012). Penelitian ini mengangkat tentang industri perfilman AS yang merupakan industri film terbesar di dunia. Secara disadari atau tidak, film yang memiliki fungsi utama sebagai media hiburan ternyata dapat digunakan sebagai media pemerintah yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi politiknya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian membutuhkan penegasan masalah untuk menggambarkan fokus bahasan yang akan dilakukan, dengan mengawali dari pertanyaan yang timbul akibat permasalahan penelitian tersebut. Oleh karena itu diperlukan perumusan masalah yang menjadi hal fundamental dalam menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, maka perumusan masalah yang dapat dihasilkan adalah:

”Mengapa Amerika Serikat Memberikan Bantuan kepada Industri Film Hollywood?”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam melakukan penelitian, diperlukan ruang lingkup pembahasan supaya penelitian dapat terfokus dalam kajian yang akan dianalisis. Jika penelitian dapat fokus, maka pembahasan permasalahan dapat dikembangkan dengan baik. Dalam karya ilmiah ini akan menggunakan dua aspek utama, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Pembagian tersebut cukup untuk menjadikan penelitian ini fokus pada satu permasalahan.

1.4 Batasan Materi

Penelitian ini memerlukan materi yang dibatasi agar penelitian dapat terfokus pada satu permasalahan yang akan diangkat. Materi tersebut merupakan materi pokok ataupun tambahan yang dapat menjadi penunjang penjelasan penelitian. Materi tersebut berupa, pertama data mengenai konstelasi yang terdapat dalam ekonomi politik industri film AS. Kedua, data mengenai industri film Hollywood yang memperoleh bantuan dari pemerintah AS. Materi tersebut akan dikaitkan satu sama lain agar rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

1.4.1 Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan fokus masa materi penelitian tersebut dibahas dalam penelitian ini. Hal tersebut berguna untuk menghindari penelitian yang tidak terarah dalam pencarian dan pembahasan materi. Penelitian ini menggunakan batasan waktu dari awal abad 20 yang merupakan tahun-tahun mulai berkembangnya industri film Hollywood. Dalam sejarah Hollywood tersebut, ada yang membaginya menjadi empat periode utama: era film bisu, era sinema Hollywood klasik (1917-1960-an), era Hollywood baru (1960-an-1980-an), dan periode kontemporer (1980-an-sekarang). Penulis akan fokus pada era Hollywood baru hingga tahun 2019. Namun penulis juga memungkinkan untuk mengambil data dari periode sebelumnya demi memperkaya data penelitian.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibalik pemberian bantuan Pemerintah AS terhadap industri film Hollywood. Hal tersebut merupakan fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan relasi antara ekonomi dan politik yaitu pasar dan negara. Pendekatan ekonomi politik merupakan pendekatan yang saling mengaitkan aspek ekonomi dalam hal ini seperti kepemilikan serta pengendalian media, aspek kepemimpinan dan faktor-faktor lain yang menyatukan industri media dengan industri lain, termasuk dengan elit politik, ekonomi, dan sosial (Sudibyo, 2000, hal. 121). Pendekatan ekonomi politik yang sering muncul dalam berbagai penelitian adalah pendekatan liberal. Pendekatan tersebut melihat aspek ekonomi sebagai bagian dari kerja dan praktek profesional. Ekonomi merupakan bidang yang terpisah dan khusus.

Pendekatan kritis dalam kasus ekonomi politik jarang digunakan oleh peneliti dalam melihat suatu fenomenoma, khususnya dalam melihat fenomena industri hiburan film AS. Ekonomi politik kritis mengacu pada pendekatan yang menekankan pada distribusi kekuasaan yang tidak merata dan mengkritisi terhadap aturan yang tidak setara dipertahankan dan direproduksi.

Prinsip pemerintahan yang demokratis yang dikuasai banyak orang telah menjadi pedoman dan inspirasi bagi para sarjana pandangan kritis. Koreksi terhadap ide dan warisan kontrol negara yang tersentralisasi yang dilakukan oleh negara-negara komunis di bawah pengaruh Komintern³. Marxisme barat menganut prinsip demokrasi partisipatif dalam penolakannya terhadap Komunisme Soviet dan memulai penilaian ulang yang positif terhadap lembaga pemerintah. Dengan demikian teori demokrasi telah melayani, melengkapi, menantang, dan melampaui batasan Marxisme pada teori dan praktek. Terhubung dengan pengaruh kunci ketiga

³ *The Third International*, organisasi komunis (1919-1943)

yaitu teori/politik budaya. Ekonomi politik kritis dibentuk dan dipengaruhi oleh hubungan lintas antara Marxisme, teori demokrasi dan organisasi, serta teori budaya dan politik (Hardy, 2014).

Ekonomi politik kritis yang ada dalam media komunikasi, penggambarannya menjadi luas. Hal tersebut mencakup ekonomi, ilmu politik, komunikasi, dan analisis budaya. Pendekatan kritis bertentangan dengan pendekatan 'arus utama' dalam riset komunikasi serta juga dalam tradisi ekonomi, politik, dan sosial (Hardy, 2014). Karena mengungkapkan hal-hal yang tidak terlihat oleh publik pada umumnya.

Pendekatan kritis mengacu pada mengkritisi terhadap definisi kapitalisme dan pemerintahan yang dikuasai elit. Ekonomi politik kritis bersandar pada klaim sentral: berbagai cara mengorganisir dan membiayai produksi media yang memiliki implikasi terhadap jangkauan dan sifat konten dari media serta bagaimana media tersebut dikonsumsi dan digunakan. Pertanyaan-pertanyaan terkait ekonomi politik kritis adalah; Suara dan pendapat siapa yang didengar media? Bagaimana orang, ide, dan nilai direpresentasikan dalam wacana media dan apa yang mempengaruhi cara tersebut terjadi? Apa kualitas informasi, ide, dan citra yang diwakilkan dalam media dan kepada siapa itu tersedia? Pendekatan ini menanyakan pertanyaan mengenai pihak yang berpengaruh dalam komunikasi dan kondisi untuk mewujudkan demokrasi. Hal ini terhubung pada dua pengaruh utama: marxisme dan praktik politik demokratis (Hardy, 2014).

Salah satu varian dalam pendekatan ekonomi politik yang bersifat kritis adalah pendekatan instrumental, yang mampu memberikan penjelasan pada penelitian ini. Secara garis besar, inti dari teori ini ada pada pendapat jika negara sebagai instrumen penindasan dan administrasi yang bisa digunakan oleh kelas-kelas sosial yang memiliki kontrol di atasnya dengan tujuan tertentu. Pandangan ini melihat kekuasaan negara berada di tangan kelas sosial tertentu untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politik (Hiariej, 2003). Dengan dasar pandangan tersebut, penelitian ini melihat media sama dengan negara yaitu sebagai instrumen untuk pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Pendekatan ini memiliki pendapat jika media ditentukan oleh elemen ekonomi sebagai faktor atau variabel yang determinan. Faktor ekonomi dalam pendekatan ini tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan faktor lain. Dominasi dalam hubungan ini digambarkan secara searah tanpa perlawanan. Jalannya media yang terjadi ditentukan oleh faktor ekonomi, sehingga berakibat apa yang tergambar di media merupakan pencerminan dari kepentingan dan dominasi dari kelompok dan kekuatan ekonomi (Sudibyo, 2000).

Asumsi dasar pendekatan ini adalah media tidak dapat hidup tanpa disokong oleh ekonomi, sehingga ekonomi menjadi faktor yang krusial. Karena itu, proses bekerjanya media sebagian besar ditentukan kepentingan ekonomi (Sudibyo, 2000). Pada dasarnya, dalam hal ini media dijadikan sebagai alat atau instrumen oleh pihak yang mendominasi atau memiliki kekuatan ekonomi untuk kepentingannya sendiri (Alfarabi, 2010).

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis alasan pemerintah sebagai pengelola sumber daya negara, memberikan bantuan kepada media film. Dalam pandangan ekonomi politik kritis seharusnya pemerintah tidak dapat menggunakan sumber daya milik publik untuk mendukung satu jenis film daripada yang lain yang berdampak pada perubahan konten atau isi dalam film. Melalui pendekatan instrumental, konten atau isi dalam film ditentukan oleh kepentingan dan kekuatan ekonomi politik. Edward S. Herman dan Noam Chomsky memberikan penjelasan berdasarkan pendekatan instrumental jika media melakukan proses penyaringan (Herman & Chomsky, 1988). Proses tersebut akan dijelaskan pada konsep berikutnya.

1.5.2 Konsep Propaganda

Fungsi media pada umumnya adalah sebagai sistem untuk mengkomunikasikan pesan dan simbol pada masyarakat umum. Selain itu media juga berfungsi sebagai hiburan dan informasi, serta menanamkan individu dengan nilai-nilai, kepercayaan dan kode perilaku yang akan mengintegrasikan mereka ke dalam struktur kelembagaan masyarakat yang lebih besar. Dunia memiliki konflik

kepentingan kelas yang besar di dalamnya. Untuk memenuhi peran dalam hal tersebut dibutuhkan suatu propaganda yang sistematis (Herman & Chomsky, 1988).

Propaganda adalah penyebaran informasi (dalam hal ini adalah fakta, argumen, setengah kebenaran, atau kebohongan) untuk mempengaruhi opini publik. Upaya propaganda kurang lebih sistematis untuk memanipulasi kepercayaan, sikap atau tindakan orang lain melalui simbol (kata-kata, gerakan, spanduk, monumen, musik, pakaian, lencana, gaya rambut, desain pada koin dan perangko, dan sebagainya). Kesengajaan atau penekanan yang cenderung berat pada manipulasi merupakan perbedaan antara propaganda dengan percakapan biasa atau pertukaran gagasan yang bebas dan mudah (Smith, 2020).

Model kontrol propaganda media diperkenalkan oleh Edward S. Herman dan Noam Chomsky pada tahun 1988. Teori propaganda yang diperkenalkan tersebut menjelaskan mengenai propaganda yang bekerja dalam media massa. Model tersebut berfokus pada ketidaksetaraan kekayaan dan kekuasaan serta efek multilevelnya terhadap kepentingan dan pilihan media massa. Model ini memperlihatkan uang dan kekuasaan dapat menyaring konten yang cocok untuk ditunjukkan, memarginalkan perbedaan pendapat, dan memungkinkan pemerintah atau swasta yang dominan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik (Herman & Chomsky, 1988).

Propaganda dapat menjadi sebuah motif dari pihak tertentu dalam suatu keputusan. Misalnya dalam pemberian bantuan oleh pemerintah pada industri film sebagai media yang dapat menyampaikan propaganda. Model dan cara kerja propaganda berasal dari fakta bahwa media sangat bergantung pada sistem pasar. Media merupakan bisnis yang mencari keuntungan, dengan didanai sebagian besar oleh pengiklan yang merupakan entitas pencari keuntungan. Pemerintah dan perusahaan bisnis non-media besar merupakan pihak dalam posisi paling diuntungkan untuk dapat menekan media dengan ancaman sumber daya yang dimilikinya. Seperti ancaman penarikan iklan atau lisensi penayangan, tuntutan pencemaran nama baik, dan cara-cara lainnya. Model ini menunjukkan bahwa media dapat membingkai informasi dan pemikiran masyarakat dalam parameter kepentingan elit.

Salah satu media yang dapat digunakan dalam instrumen propaganda adalah film. Film merupakan media yang dapat menyampaikan informasi secara langsung maupun tidak langsung. Media seperti berita dalam televisi maupun surat kabar, informasi di dalamnya disampaikan secara langsung atau *to the point*. Sehingga masyarakat dapat langsung memahami inti dari informasi yang ingin disampaikan. Namun film dapat dijadikan sebagai sarana untuk penyampaian informasi secara tersirat dalam suatu hiburan atau tontonan masyarakat umum. Sehingga seringkali masyarakat secara tidak sadar menerima dan mengolah informasi yang didapatkan dari film tersebut dengan cara halus. Film juga cenderung dapat diterima oleh semua kalangan dan dapat disebarluaskan. Oleh karena itu film juga dapat digunakan sebagai media propaganda yang efektif.

Model propaganda Hollywood dapat dijelaskan dengan teori asli Herman dan Chomsky untuk media berita. Model ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana film dibangun secara sistematis untuk mendukung satu sudut pandang di atas yang lain. Dalam teori tersebut ada lima filter sebelum pada akhirnya media tersebut disajikan pada masyarakat luas (Alford, 2009).

a. Kepemilikan Perusahaan yang Terkonsentrasi

Filter yang pertama adalah kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi. Banyak perusahaan media yang besar terintegrasi penuh dalam pasar. perusahaan tersebut dikuasai oleh elit berkuasa yang memiliki kekayaan besar. Orientasi perusahaan tersebut adalah keuntungan pasar tinggi. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki ketertarikan pada satu sama lain, industri besar lain, dan pemerintah. Hal ini merupakan filter pertama yang memiliki kekuatan besar dan sangat mempengaruhi konten film yang beredar di masyarakat luas (Herman & Chomsky, 1988).

b. Iklan

Filter kedua pada konsep propaganda Herman dan Chomsky adalah iklan. Iklan merupakan salah satu sumber pendapatan pada industri hiburan. Meskipun film tidak tergantung pada pendapatan dari sektor iklan, penempatan produk dan penawaran merchandising dapat menarik pembuat

film. Karena jika film mengalami kegagalan, pendapatan sektor iklan dapat menutupi kerugian. Dengan demikian, produser film saling bersaing untuk mendapatkan pembiayaan dari iklan. Akibatnya, banyak produser film yang cenderung memilih untuk mengikuti arus pasar pada naskah ceritanya sehingga akan menang bersaing dan mendapatkan iklan (Alford, 2009).

c. Sumber Konten

Kemudian filter ketiga adalah sumber konten. Sumber dalam konsep propaganda Herman dan Chomsky merupakan sumber materi berita yang akan ditampilkan pada masyarakat. Hal tersebut juga berlaku dalam film. Untuk mendapatkan kualitas film yang baik, akan lebih mudah jika mendapatkan sumber konten untuk naskah dan skenario dari sumber aslinya (Alford, 2009). Dalam film sumber ini bisa juga berasal dari pemerintah dan lembaganya. Pihak yang memberikan materi dapat mengungkapkan kebenaran keseluruhan yang ingin produser film dapatkan, tetapi pihak tersebut juga dapat memberikan sumber yang separuh benar maupun sumber yang berbeda dengan kenyataan.

d. Kritik

Filter berikutnya adalah kritik yang mengacu pada tanggapan negatif terhadap pernyataan atau program media. Tindakan tersebut contohnya berupa surat, telegram, panggilan telepon, petisi, tuntutan hukum, pidato, ancaman, tindakan hukuman, dan lain sebagainya. Berbagai tindakan tersebut dapat berasal dari tindakan individu maupun kelompok yang dapat diatur atau independen. Pemerintah dalam industri film merupakan sumber utama dari filter ini. Pemerintah melakukan serangan, ancaman, dan mengoreksi media. Pada kesempatan-kesempatan ini ketika film-film radikal muncul menentang dominasi dan kekuatan AS, reaksi para penegak hukum bisa sangat kuat. Pemerintah menggunakan segala *resources* untuk menentang produser film sehingga film tersebut dapat gagal ditayangkan bahkan gagal dibuat (Alford, 2009).

e. Ideologi Anti-Komunisme

Filter yang terakhir adalah anti komunisme sebagai mekanisme kontrol. Cerita pada film Hollywood seringkali didasarkan pada representasi tentang kebaikan dan kejahatan, dengan kecenderungan untuk mendukung ‘orang baik’ pada film. Hal tersebut sudah umum ditemui dalam berbagai film. Seringkali musuh pada film-film Hollywood direpresentasikan oleh komunisme. Selain komunisme, radikalisme juga menjadi salah satu representasi musuh yang seringkali dimunculkan. Terutama setelah peristiwa 9/11 yang terjadi di AS. Hollywood berusaha untuk mempertahankan ideologi liberal agar menjadi dominan, terutama dengan dorongan pemerintah (Alford, 2009).

Anti-komunisme dipilih, terutama untuk menekankan unsur-unsur ideologis yang paling penting, yaitu pendisiplinan dan mekanisme kontrol. Chomsky memiliki gagasan tentang ‘kebaikan bersama’, yaitu jika masyarakat harus bersatu dalam perlindungan kekuatan domestik. Hal tersebut memerlukan sesuatu untuk menakuti masyarakat, untuk mencegah apa yang sebenarnya terjadi pada mereka sendiri. Dalam hal itu harus ada ketakutan dan kebencian untuk menyalurkan jenis ketakutan dan kemarahan, atau ketidakpuasan karena realita yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti ketidakpuasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial dan ekonomi (Alford, 2009).

1.6 Argumen Utama

Pemerintah AS memberikan bantuan berupa perlengkapan, peralatan, izin lokasi, hingga pendampingan kepada industri film Hollywood. Alasan pemerintah AS memberikan bantuan tersebut adalah agar tunduk pada model propaganda dan sebagai instrumen propaganda Pemerintah AS. Propaganda yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu sebagai iklan produk AS, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Kedua sebagai alat untuk menyebarkan citra baik dan menghapus citra buruk Pemerintah AS. Terakhir adalah sebagai alat

penyebaran ideologi AS. Propaganda tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan atau penyesuaian dalam isi dari film sesuai kepentingan Pemerintah AS. Akibat propaganda tersebut, masyarakat hanya menerima tayangan yang telah mendapat persetujuan Pemerintah AS, bukan tayangan yang orisinal dan mewakili beragam suara dari masyarakat.

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dapat dijadikan referensi atau tambahan materi untuk memperkaya isi dari tulisan penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu berguna sebagai perbandingan. Dengan itu penelitian yang dilakukan ini terbukti orisinal. Terdapat beberapa penelitian dengan obyek yang sama dengan tulisan ini, yaitu mengenai industri film Hollywood.

Penelitian pertama dari skripsi yang berjudul *Propaganda Demokrasi Amerika Serikat Melalui Film Komedi (Studi Analisis Isi Film The Dictactor)* oleh MA. Faisal Datu Sefa. Skripsi ini fokus pada propaganda yang terdapat dalam film *The Dictactor* (2012) yaitu film komedi Amerika Serikat. Propaganda tersebut mengkritik kepemimpinan diktator yang digambarkan negatif. Analisis isi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui propaganda yang terdapat dalam film tersebut.

Penelitian lain adalah jurnal yang berjudul *Embassy Support for Hollywood's Global Dominance: Cultural Imperialism Redux* oleh Paul Moody. Penelitian tersebut mengenai dukungan dan tindakan yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS untuk menjadikan film sebagai alat untuk menyebarkan paham. Jadi film sebagai alat imperialisme dengan tujuan dominasi global Hollywood.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah didapatkan, belum ditemukan oleh penulis mengenai penelitian tentang bantuan kepada industri film Hollywood untuk mencapai kepentingan ekonomi politik AS. Penelitian yang telah dilakukan beberapa adalah mengenai propaganda yang terdapat dalam film Hollywood. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat menarik untuk dibahas secara mendalam demi memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Terdapat tiga jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan *mix method* atau perpaduan dari kedua jenis penelitian lain. Penelitian dalam tulisan ini memiliki jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur; mengumpulkan data dalam pengaturan peserta; menganalisis data secara induktif, membangun mulai dari yang khusus hingga tema umum; dan membuat interpretasi makna data (Creswell, 2014).

1.7.2 Teknik pengumpulan data

Penelitian kualitatif memerlukan data untuk mempermudah penelitian. Data yang digunakan adalah dengan studi literatur. Terdapat rancangan dalam pengumpulan literatur agar lebih mudah dalam menemukan data yang relevan (Creswell, 2014):

1. Dalam studi kualitatif, gunakan literatur yang hemat di awal untuk menyampaikan penelitian secara induktif, kecuali jika jenis penelitian membutuhkan orientasi literatur yang substansial di awal.
2. Pertimbangkan tempat yang tepat untuk literatur dalam studi kualitatif, dengan didasarkan pada keputusan pada penempatan di awal untuk meringkai masalah. Menempatkannya di bagian yang terpisah, dan menggunakannya di akhir untuk membandingkan temuan.

Selain itu dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti memaparkan langkah-langkah yang akan ditempuh agar mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Mengumpulkan berbagai data yang berbentuk *secondary data* dari berbagai sumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Perpustakaan Universitas Jember, berbagai buku milik koleksi pribadi, dan berbagai laman *website* antara lain: *Research Gate*,

Eprints, Google Scholar, Microsoft Academy, Wiley Online Library, Indonesian Publication Index, dan lain-lain. Data-data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan industri film Hollywood terutama yang berhubungan dengan pemerintah AS. Seperti mengenai ekonomi dan politik, propaganda, aktor-aktor yang terlibat dan lain sebagainya.

2. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah memilah data berdasarkan bahasan materi. Data-data tersebut dapat dikelompokkan dengan cara membuat folder-folder sesuai bahasan secara *offline* dengan dikumpulkan dalam *file holder* atau online juga dapat membuat file folder data.
3. Langkah berikutnya adalah mengolah data yang telah diperoleh dengan cara menganalisisnya.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai bantuan yang didapatkan industri film Hollywood dari pemerintah AS. Analisis tersebut pada dasarnya terdiri dari proses penggambaran, penjelasan, dan interpretasi kepada suatu objek yang merupakan konteks pembahasan. Dimulai dari penggambaran mengenai hubungan antara berbagai aktor dalam konstelasi industri film Hollywood dan perannya. Kemudian memaparkan bukti-bukti adanya bantuan yang diterima oleh industri film Hollywood. Hingga pada bagian akhir adalah mengenai analisis alasan yang melatarbelakangi diberikannya bantuan tersebut kepada industri film Hollywood.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dalam lima bab yang dapat menjelaskan secara keseluruhan mengenai tema yang akan dibahas. Lima bab tersebut sebagai berikut:

Bab. 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan penelitian, yaitu tentang bantuan yang diberikan terhadap industri hiburan Hollywood dari AS, dengan menjabarkan hal-hal yang dirasa menyimpang. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui pentingnya tulisan ini dibuat. Selain itu juga rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. 2 Industri Film Hollywood dalam Konstelasi Ekonomi Politik Amerika Serikat

Bab ini menjabarkan mengenai pihak-pihak yang terlibat dan hubungannya dalam ekonomi politik industri film Hollywood dan AS. Termasuk di dalamnya contoh-contoh film yang dilihat mendapat bantuan dari pemerintah AS.

Bab. 3 Bentuk Bantuan Industri Film Hollywood dari Amerika Serikat

Bab ketiga akan lebih dalam dan mulai menuju pada permasalahan utama penelitian ini. Isinya adalah menjabarkan mengenai bantuan yang diberikan kepada industri film Hollywood oleh Amerika Serikat.

Bab. 4 Analisis Alasan Pemerintah Amerika Serikat Memberikan Bantuan kepada Industri Film Hollywood

Bab keempat merupakan analisis latar belakang Amerika Serikat memberikan bantuan kepada industri film Hollywood menggunakan teori ekonomi politik.

Bab. 5 Kesimpulan

Bab terakhir merupakan inti dari penelitian ini dan juga jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II INDUSTRI FILM HOLLYWOOD DALAM KONSTELASI EKONOMI POLITIK AMERIKA SERIKAT

2.1 Sejarah Singkat Perkembangan Industri Film Hollywood

Industri film Hollywood merupakan industri film yang berada atau diproduksi di Amerika Serikat. Hollywood merupakan nama kawasan yang terletak di Los Angeles, California. Pusat bagi banyak studio televisi dan film besar serta korporasi industri film juga perusahaan rekaman terkemuka berada di wilayah tersebut. Pada awal abad 20-an, Hollywood didirikan dan mulai berkembang. Film pertama yang selesai diproduksi di Hollywood adalah *The Count of Monte Cristo* tahun 1908, diikuti dengan banyak perusahaan film besar yang pindah ke Hollywood pada tahun-tahun setelahnya (History.com, 2018).

Hollywood memiliki zaman keemasan yang membawa prestis internasional ke industri AS tersebut. Pertumbuhan, eksperimen, dan perubahan besar terjadi di bawah sistem studio yang mengendalikan. Lima studio film mendominasi pada zaman tersebut, yaitu: Warner Brothers, RKO, Fox, MGM dan Paramount. Serta beberapa studio kecil diantaranya adalah Columbia, Universal, dan United Artist. Zaman ini berada pada era film bisu hingga muncul film-film dengan suara. Produser Hollywood mengembangkan dengan membuat film barat, musikal, drama romantis, film horor dan dokumenter yang meningkatkan reputasi Hollywood sebagai tanah kemakmuran dan ketenaran (History.com, 2018).

Pada zaman keemasan Hollywood, Perang Dunia I berlangsung, hal tersebut berdampak pada studio film Hollywood ikut terlibat dalam propaganda politik. Presiden AS saat itu, yaitu Woodrow Wilson memberikan arahan serta tekanan kepada industri film Hollywood untuk ikut membantu strategi perang AS. Pada Perang Dunia II, studio film Hollywood lebih memproduksi film dengan unsur komedi. Karena pada masa perang ini masyarakat perlu lebih banyak hiburan daripada sebelumnya. Di balik film dengan unsur komedi tersebut, diselipkan juga propaganda perang dengan cara ringan yang secara sadar atau tidak diketahui oleh masyarakat. Aturan film pada masa tersebut cukup ketat karena studio film harus mempersiapkan pertahanan sipil akibat perang yang terjadi. Larangan-larangan

diberlakukan, seperti pembuatan film di laut atau dekat dengan instalasi militer dilarang, juga larangan untuk membuat film pada malam hari. Hingga pada tahun 1942, anggaran maksimal ditentukan oleh *War Production Board* yaitu sejumlah maksimal 5.000 dolar AS untuk set film baru. Hal tersebut memaksa studio film untuk mengambil jalan pintas dan mencari cara kreatif dan murah agar dapat memproduksi film (Kugel, 2017).

Tahun 1960-an dan 1970-an menjadi zaman keemasan Hollywood kedua, karena perubahan aturan-aturan ketat yang menjadi longgar. Seperti sebelumnya pada era tahun 1930-an terdapat pembatasan konten seksual, kecabulan, dan kekerasan yang membatasi kreatifitas produser film. Perubahan tersebut memunculkan inovasi-inovasi yang bebas berkuasa atas konten kontroversial yang jelas tidak “ramah keluarga”. Selain itu pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun penentuan pasca Perang Dunia II. Film seringkali digunakan oleh negara-negara yang berperan dalam Perang Dingin, yaitu perang pasca Perang Dunia II untuk menanamkan ideologi (Ariansah, 2014).

Pada tahun 2000-an ke atas, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Dunia digital semakin meluas hingga dapat dijangkau luas oleh masyarakat. Hollywood mulai melebarkan pasarnya hingga ke Asia. Asia merupakan target pasar yang besar. Pada tahun 2017, pendapatan Hollywood di Cina mencapai 8,6 miliar dolar AS. Termasuk Indonesia yang menjadi pasar besar Hollywood. Film *Jumanji: Welcome to the Jungle* meraih pendapatan sebesar 11,8 juta dolar AS dari pendapatan totalnya sebesar 674 juta dolar AS pada tahun 2017. Dengan pendapatan sebesar itu, film *Jumanji: Welcome to the Jungle* menjadi film terlaris di Indonesia tahun 2017 (Wibisono, 2018).

2.2 Konstelasi Industri Film Hollywood

Konstelasi industri film Hollywood dapat digambarkan dalam hubungan antara berbagai pihak, yaitu pertama adalah dari pihak pemerintah AS, kedua dari korporasi atau perusahaan film Hollywood, ketiga adalah masyarakat global. Ketiga pihak saling berkaitan satu sama lain dalam konstelasi industri film Hollywood. Dari pihak pemerintah AS diantaranya adalah departemen luar negeri, departemen

pertahanan, dan *Central Intelligence Agency* (CIA). Kemudian dari pihak korporasi atau perusahaan film, akan diwakili dari anggota *Motion Picture Association of America* (MPAA) yang terdiri dari 5 studio besar dan satu layanan *streaming* video.

Pemerintah AS melalui CIA dan Departemen Pertahanan menentukan konten dalam film dan televisi secara langsung, berkala, dan rahasia. Hal tersebut lebih terlihat sejak tahun 1980-an, terutama untuk film yang menyajikan sejarah resmi dan meningkatkan kebenaran dalam kebijakan luar negeri AS. Hubungan politik dan film yang signifikan ditemukan pada pergantian abad 20-an jika kantor kecil di Departemen Pertahanan telah membantu proses produksi lebih dari 200 judul film.

2.2.1 Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah AS merupakan salah satu pihak yang memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap industri film Hollywood. Industri film Hollywood merupakan industri yang memiliki kontribusi ekonomi serta politik yang besar bagi pemerintah AS. Terutama sebagai penyumbang perekonomian yang besar, sebagai alat promosi bagi pandangan politik atau pencitraan negara, dan dapat digunakan sebagai alat diplomasi, serta masih banyak manfaat lain yang akan dijelaskan lebih dalam pada bagian tersendiri dalam penelitian ini. Beberapa departemen di AS juga ikut memiliki peran, di antara lain:

a. Departemen Luar Negeri

Tahun 1789, Kongres AS mendirikan departemen luar negeri yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan luar negeri AS. Departemen tersebut mengawasi lebih dari 270 kedutaan, konsulat, dan pos diplomatik lainnya di seluruh dunia. Masing-masing berfungsi sebagai pusat inisiatif kebijakan luar negeri AS di negara tuan rumah masing-masing.

Beberapa penelitian mengungkapkan jika terdapat dukungan yang diberikan kepada Hollywood oleh kedutaan besar AS yang beroperasi. Hal tersebut menjelaskan adanya minat khusus departemen luar negeri terutama terhadap perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan hak kekayaan intelektual (HKI). Kedutaan

AS ikut dalam memantau negara-negara yang dianggap melanggar HKI, emnegakkan perjanjian FTA dan HKI yang seringkali merugikan negara-negara yang meratifikasi tersebut, dan mengambil langkah-langkah hukuman terhadap negara-negara yang tidak patuh pada aturan perjanjian (Moody, 2017).

Areaiketahui jika terdapat empat cara kedutaan besar Departemen Luar Negeri AS mendukung kepentingan ekonomi Hollywood (Moody, 2017):

1. Sebagai pengintai untuk pasar-pasar Hollywood di negara lain

Secara khusus, kedutaan besar AS memantau dan menilai kondisi pasar lokal dan nasional untuk mendukung Hollywood. Hasilnya kemudian dilaporkan kembali ke departemen luar negeri mengenai kegiatan dari negara tuan rumah tersebut dan implikasinya bagi perdagangan AS dan hubungan internasional, serta menggambarkan peristiwa-peristiwa yang mungkin memiliki pengaruh di masa depan pada profitabilitas film dan pembuat film Hollywood. Pada tahun 2010, kedutaan menilai jika ada potensi untuk produksi ulang film Hollywood/Bollywood di Mumbai dan menguraikan adanya kesulitan potensial yang dihadapi Hollywood dalam membuat produksi film dengan mitra studio di India. Potensi menguntungkan untuk memproduksi film Hindi telah direalisasikan oleh beberapa studio AS, mulai dari Sony, Disney, dan Warner Brothers.

2. Sebagai promotor FTA

Cara kedua adalah dengan mempromosikan perdagangan bebas. Contohnya pemerintah Maroko dalam rangka mengembangkan industri filmnya, memberikan kebebasan pajak untuk para produsen film internasional. Tujuannya untuk memanfaatkan keberhasilan wilayah Maroko sebagai lokasi produksi film Hollywood. Perjanjian FTA AS-Maroko yang telah diratifikasi pada tahun 2006, memastikan bahwa lebih banyak produksi film Hollywood akan berlokasi di wilayah tersebut di masa mendatang.

3. Sebagai pemantau HKI

Cara ketiga adalah dengan memantau hak kekayaan intelektual Hollywood. Masalah yang paling umum dibahas mengenai kepentingan ekonomi Hollywood adalah mengenai HKI, khususnya mengenai pelanggaran hak cipta atau dalam bahasa lain “pembajakan”. Hak cipta dipandang sebagai jaminan akan

internasionalisme Hollywood karena menstabilkan pasar dan menjadikannya sebagai alat untuk memprediksi pasar. Hal tersebut menjadi faktor penting dibalik biaya yang besar dari produksi film. Dengan demikian, peran departemen luar negeri sebagai promotor HKI global sangat penting untuk mempertahankan landasan kokoh bagi industri ini.

4. Mempengaruhi negara tuan rumah masing-masing

Terakhir adalah dengan cara mempengaruhi tokoh-tokoh kunci di dalam negara tuan rumah masing-masing sehingga kondisi pasar lebih kondusif bagi Hollywood. Di Abuja, direktur jenderal Komisi Hak Cipta Nigeria, Adembambo Adewopo, bertemu dengan staf kedutaan dan memuji mereka untuk program pelatihan HKI yang mereka selenggarakan bersama dengan kantor hak paten dan merek dagang Amerika Serikat, yang dihadiri oleh 18 pejabat HKI Nigeria dibanding tahun sebelumnya. Dia memohon kedutaan untuk mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk "membangun kehadiran" di negara itu setelah keputusan MPAA untuk menyarankan anggotanya untuk menarik diri dari distribusi di Nigeria karena masalah penegakan HKI.

b. Departemen Pertahanan

Departemen Pertahanan AS menyediakan pasukan militer yang diperlukan untuk mencegah perang dan memastikan keamanan negara. Anggaran pertahanan nasional AS mencapai 3,1% dari Produk Domestik Bruto, yaitu sebesar \$ 716 miliar. Departemen ini juga memiliki 4.800 situs pertahanan yang tersebar di lebih dari 160 negara dalam 7 benua.

Kekuatan militer yang dimiliki AS sangat kuat, sehingga AS dijuluki sebagai negara *superpower*. Terbukti dengan 1,4 juta tentara, nomor dua terbesar setelah China. Selain itu juga terdapat tentara cadangan sebesar 1,1 juta, belum termasuk anggota angkatan laut yang dijuluki sebagai pasukan elit paling mematikan di dunia. Angkatan udara AS memiliki pesawat tempur dengan total 2.785 unit, pesawat transportasi sebesar 5.739 unit, 6000 helikopter, dan 957 helikopter tempur. Sedangkan angkatan daratnya memiliki 8.848 tank, sehingga membuat AS menduduki peringkat pertama negara dengan jumlah tank terbesar.

Selain itu militer AS juga memiliki 41.063 kendaraan lapis baja dan juga menjadi negara nomor satu yang memiliki kendaraan lapis baja terbanyak di dunia. Terakhir untuk angkatan laut AS memiliki 72 kapal selam yang menjadi nomor satu terbanyak di dunia (Rizal, 2017).

Pada pemerintahan Presiden Ronald Reagan, pemerintah mendukung industri film dengan memberikan dukungan dan insentif, agar mampu menampilkan citra AS yang superior, terutama dalam bidang militer. Contohnya adalah film *Top Gun* yang dirilis pada tahun 1986 yang digunakan sebagai alat untuk memperlihatkan kekuatan angkatan udara, patriotisme, serta kebijakan luar negeri AS. Pemerintah memberikan berbagai dukungan dan bantuan diantaranya seperti fasilitas *Air Force* atau fasilitas militer lainnya. Namun film-film tersebut harus memenuhi beberapa kriteria untuk menerima bantuan tersebut (Kellner, 1996). Kriteria tersebut yaitu:

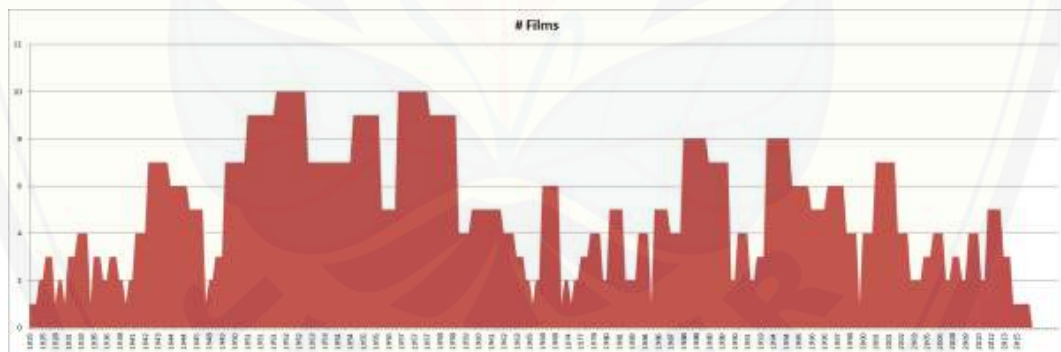
1. Terdapat manfaat dan keuntungan untuk kepentingan nasional AS terutama untuk Departemen Pertahanan AS.
2. Film tersebut harus memberikan pengetahuan publik terhadap angkatan militer dan Departemen Pertahanan AS.
3. Film tidak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan dukungan aktivitas individu atau kelompok yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah AS.
4. Jika film bersifat fiksional, maka harus menggambarkan kehidupan, operasi, dan kebijakan militer yang wajar serta pantas. Jika film bersifat asli atau berdasarkan kejadian nyata maka harus otentik dengan peristiwa tersebut.
5. Film harus mendukung program rekrutmen dan retensi program.
6. Produser film harus menyepakati, mematuhi, dan menandatangani kesepakatan produksi.

Melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi AS, antara tahun 1911 hingga 2017 ditemukan lebih dari 800 film menerima dukungan dari departemen pertahanan AS. Termasuk didalamnya film-film dengan jumlah perolehan pendapatan yang tinggi dan digemari oleh masyarakat dunia seperti *Transformers*,

Iron Man, dan The Terminator (Alford, 2017). Namun dibalik bantuan yang diberikan oleh departemen pertahanan AS, produser film harus melakukan pengubahan untuk mengakomodasi tuntutan militer. Naskah film harus diserahkan kepada kantor penghubung hiburan untuk diperiksa. Jika terdapat karakter, aksi, atau dialog yang tidak disetujui, maka produser film tidak dapat mengakses fasilitas militer atau bantuan yang mereka butuhkan. Jika disetujui oleh pihak departemen pertahanan, maka akan ada kontrak “Perjanjian Bantuan Produksi” yang akan mewajibkan produser untuk menggunakan versi naskah yang disetujui militer (Secker & Alford, 2017). Beberapa film juga gagal untuk mendapatkan bantuan dari departemen pertahanan karena beberapa alasan. Hal tersebut mengakibatkan film tersebut gagal diproduksi. Contohnya adalah film yang akan diberi judul *Fields of Fire* dan *Top Gun 2* (Secker & Alford, 2017).

Gambar 2.1.

Grafik produksi film yang didampingi oleh departemen pertahanan tahun 1915-2015.



Sumber: spyculture.com/dod-film-list-spreadsheet-version/

c. Central Intelligence of America (CIA)

CIA resmi didirikan atas dasar Undang-Undang Keamanan Nasional AS tahun 1947, ditandatangani oleh Presiden Truman. Organisasi intelejen tersebut bertujuan untuk menghubungkan, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi yang mempengaruhi kemandirian nasional. Informasi yang yang didapatkan CIA membantu militer, eksekutif, dan para pemimpin legislatif dalam proses pengambilan

keputusan. Kegiatan yang dilakukan CIA juga mencakup operasi rahasia. Secara historis, operasi tersebut telah memasukkan kegiatan militer dan kampanye propaganda.

Terdapat empat sektor didalam CIA untuk mempermudah menjalankan misinya. Pertama, *National Clandestine Service* (Sebelumnya disebut sebagai *Directorate of Operation*), yang berfungsi untuk merekrut dan mengelola agen yang bertugas untuk mendapat informasi, dan juga upaya-upaya untuk mempengaruhi atau menggulingkan pemerintah asing, partai politik, atau pemimpin melalui pendanaan rahasia, pelatihan, operasi paramiliter dan propaganda. Kedua, *Directorate of Intelligence*, yang berfungsi menyatukan informasi dari agen, satelit, siaran televisi dan radio, buletin, publikasi ilmiah, serta untuk membuat prediksi tentang peristiwa dan untuk memberikan informasi untuk pembuat kebijakan. Sektor ketiga yaitu *Directorate of Science and Technology* yang berfungsi untuk memonitor citra satelit, komunikasi militer, transmisi rudal, dan penyadapan dalam negara atau di kedutaan asing. Selain itu dalam sektor ini juga bertanggung jawab untuk penciptaan penyamaran dan pemalsuan dokumen, termasuk paspor asing dan akte kelahiran untuk digunakan oleh agen. Terakhir adalah sektor *Directorate of Support*, yang merupakan departemen terbesar CIA. Fungsi dari sektor tersebut adalah pada bidang administrasi seperti mengelola gaji agensi, pusat peralatan kantor, dan upaya pencucian uang. Sektor ini juga menyediakan pelayanan medis bagi petugas yang ditempatkan di luar negeri, mengelola perjalanan dan transportasi kebutuhan agen, menetapkan izin keamanan, dan bekerja dengan mitra industri agen di sektor korporasi. Masing-masing sektor CIA diawasi oleh Direkur CIA (D/CIA), serta memberikan nasihat kepada pembuat kebijakan. D/CIA juga bekerja dengan *Director of Public Affairs* (DPA) untuk berkomunikasi dengan publik. Selain itu hubungan dengan pihak Hollywood bekerja melalui Public Affairs Office (PAO) CIA. PAO CIA sendiri diawasi oleh DPA dari tahun 1996 hingga 2008 (Jenkins, 2012).

Sebelum tahun 1996, walaupun belum ada badan penghubung untuk dunia hiburan dalam CIA, namun agensi tersebut menggunakan Hollywood untuk media komunikasi kepada masyarakat. CIA menggunakan film sebagai media komunikasi

pesan pro-demokrasi di negara-negara dengan tingkat buta huruf tinggi. Dengan demikian CIA berangkat untuk mempengaruhi beberapa produksi film dengan bekerja dengan pemain “patriotik” dan antikomunis di industri, termasuk pembuat film John Ford, aktor John Wayne, dan kepala studio Cecil B. DeMille, Darryl Zanuck, dan Luigi Luraschi selama tahun-tahun masa Perang Dingin (Jenkins, 2012).

2.2.2 Korporasi Industri Film Hollywood

Dalam industri film Hollywood, tidak sedikit korporasi yang berdiri di dalamnya. Namun dalam industri tersebut, hanya sedikit yang mendominasi pasar film sehingga dominasinya dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Adanya MPAA yaitu asosiasi perfilman AS, menjadi wadah bagi korporasi besar tersebut. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai MPAA dan dominasinya dalam perfilman dan korporasi industri film diluar kelompok MPAA.

a. *Motion Picture Association of America (MPAA)*

MPAA merupakan asosiasi perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan anggotanya. Anggota MPAA saat ini terdiri dari lima studio film utama Amerika Serikat (Universal Pictures, Paramount Pictures, Walt Disney Studios, Sony Pictures, dan Warner Bros) dan layanan streaming video Netflix. Sebelumnya MPAA beranggotakan enam studio besar, yaitu kelima anggota MPAA kecuali Netflix dan Twentieth Century Fox. Kemudian pada Maret 2019 lalu, Disney telah resmi menyelesaikan akuisisi 21th Century Fox (Rosalia, 2019).

Pada tahun 1922, Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA) yang merupakan nama awal dari MPAA didirikan sebagai asosiasi perdagangan anggotanya. Anggota MPPDA tersebut menguasai produksi 70 hingga 80 persen film yang dibuat di Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930, MPPDA mulai menciptakan pedoman moral tentang konten yang dapat dimasukkan dalam film yang disebut Kode Produksi atau “Kode Hays”. Kode Produksi digunakan untuk mengatur film sehingga tidak memiliki materi ofensif dan mencegah adanya campur tangan pemerintah (Aida, 2019).

Setelah beberapa tahun, kebiasaan sosial dan seksual di Amerika berubah menjadi lebih longgar. Kemudian pada tahun 1968, MPAA mulai membentuk klasifikasi film (Britannica, 2019). Setelah terbit klasifikasi film tersebut, produser film dapat membuat film diluar aturan Kode Produksi. Peringkat MPAA dalam klasifikasi film saat ini setelah beberapa tahun mengalami perubahan adalah sebagai berikut (Aida, 2019): G (*General*), untuk khalayak umum atau semua usia; PG (*Parental Guidance Suggested*), perlu bimbingan orangtua; PG-13, film mengandung konten yang tidak pantas untuk anak di bawah 13 tahun, orang tua perlu berhati-hati; R (*Restricted*), terbatas untuk anak-anak di bawah 17 tahun ditemani orang tua atau wali; NC-17, usia 17 tahun dan dibawah 17 tahun tidak diperbolehkan.

Peringkat film tidak bersifat wajib bagi produser film, artinya film tersebut tidak diharuskan untuk dikirim ke MPAA untuk mendapat peringkat. Ada biaya untuk layanan pemberian peringkat film yaitu sebesar US\$ 25.000. Namun meskipun bersifat tidak wajib, sebagian besar jaringan bioskop besar AS tidak akan memutar film yang tidak diberi peringkat. Jadi, jika film tersebut ingin bersaing di pasar, film harus memiliki peringkat (Roos, 2012).

MPAA juga menjadi organisasi untuk mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Pembajakan film, khususnya berbagi film ilegal pada jaringan peer-to-peer (P2P), merupakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus penting bagi MPAA dan anggotanya. Untuk mengurangi pembajakan, MPAA secara aktif melobi pemerintah AS dan pihak asing untuk menciptakan dan menegakkan hukum yang lebih ketat terhadap pencurian kekayaan intelektual (Roos, 2012).

Salah satu misi utama MPAA sebagai organisasi perdagangan adalah melobi pejabat terpilih dan lembaga pemerintah atas nama anggotanya yaitu studio film besar. Pada tahun 2010, MPAA menghabiskan US\$ 1,66 juta untuk melobi pemerintah federal, para pemimpin kongres, departemen kehakiman, perdagangan dan negara, dan kantor paten dan merek dagang, serta pada presiden AS saat itu. MPAA bekerjasama dibelakang *Recording Industry Association of America* (RIAA) untuk melawan situs berbagi file P2P seperti *Napster* dan *Grokster* dan

menuntut para pelaku individu. Berkat lobi yang dilakukan oleh MPAA, menghasilkan ketentuan yang ditulis dalam *Higher Education Opportunity Act* tahun 2008. Isi undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi atau universitas yang menerima bantuan keuangan siswa dari pemerintah federal harus mengembangkan dan menerapkan rencana untuk memerangi *file-sharing* ilegal di jaringan komputer sekolah. Selain itu MPAA juga memiliki kantor-kantor regional di lima negara di luar AS, dan bermitra dengan organisasi anti pembajakan di lebih dari 30 negara untuk melobi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih ketat di seluruh dunia (Roos, 2012).

Keberhasilan MPAA dibuktikan dengan hasil dua puluh lima film dengan pendapatan *box office* tertinggi di tahun 2018, seluruhnya berasal dari anggota MPAA. Dua puluh lima film teratas, mewakili 54 persen dari total *box office*, dengan lima film teratas terhitung sebagai 23 persen (Jenks, 2018). Pada saat itu Netflix masih belum bergabung dalam MPAA dan 20th Century Fox belum diakuisisi Disney.

Gambar 2.2.

25 Film pendapatan teratas *Box Office US/Canada* 2018

Rank	Title	Distributor	Box Office (US\$ MM)	Rating	3D
1	Black Panther	Disney	700.1	PG13	✓
2	Avengers: Infinity War	Disney	678.8	PG13	✓
3	Incredibles 2	Disney	608.6	PG	✓
4	Jurassic World: Fallen Kingdom	Universal	417.7	PG13	✓
5	Deadpool 2	20th Century Fox	324.5	R	✓
6	Dr. Seuss' The Grinch*	Universal	266.3	PG	✓
7	Jumanji: Welcome to the Jungle**	Sony	235.5	PG13	✓
8	Mission: Impossible – Fallout	Paramount	220.2	PG13	✓
9	Ant-Man and the Wasp	Disney	216.6	PG13	✓
10	Solo: A Star Wars Story	Disney	213.8	PG13	✓
11	Venom*	Sony	213.3	PG13	✓
12	A Star is Born*	Warner Bros.	201.2	R	
13	Aquaman*	Warner Bros.	199.1	PG13	✓
14	Bohemian Rhapsody*	20th Century Fox	189.8	PG13	
15	A Quiet Place	Paramount	188.0	PG13	
16	Ralph Breaks the Internet*	Disney	177.6	PG	✓
17	Crazy Rich Asians	Warner Bros.	174.0	PG13	
18	Hotel Transylvania 3: Summer Vacation	Sony	166.2	PG	✓
19	Halloween	Universal	159.3	R	
20	Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald*	Warner Bros.	156.8	PG13	✓
21	The Meg	Warner Bros.	145.4	PG13	✓
22	Ocean's 8	Warner Bros.	140.2	PG13	
23	Ready Player One	Warner Bros.	137.7	PG13	✓
24	The Greatest Showman**	20th Century Fox	125.3	PG	
25	Mamma Mia! Here We Go Again	Universal	120.6	PG13	

* Film still in theaters in 2019; total reflects box office earned from Jan. 1 – Dec. 31, 2018

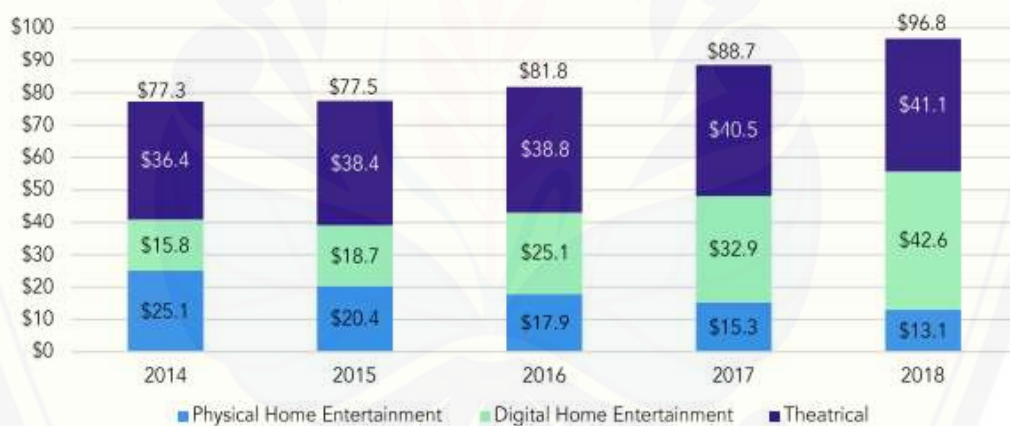
** Film released in theaters in 2017; total reflects box office earned from Jan. 1 – Dec. 31, 2018

Sumber: 2018 Theme Report MPAA

Pada tahun 2018, total pendapatan film bioskop dan layanan hiburan dari rumah mencapai 96,8 milyar dolar AS, sembilan persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan 25 persen meningkat dibandingkan tahun 2014. Sejak 2014, pendapatan global bioskop meningkat 13 persen, ketika layanan hiburan film dari rumah meningkat sebesar 36 persen. Peningkatan layanan film dari rumah disebabkan oleh meningkatnya *digital home entertainment*.

Gambar 2.3.

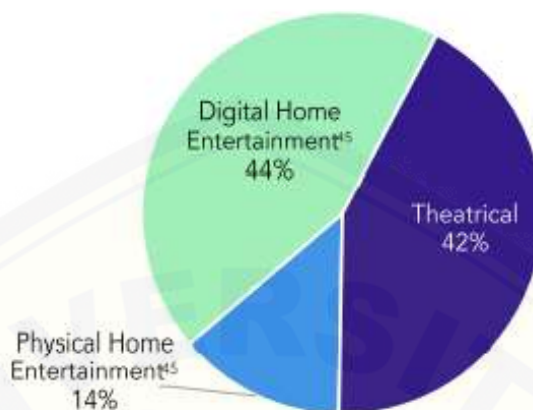
Pendapatan Bioskop Global dan Hiburan Film dari Rumah 2018 (Milyar Dolar AS)



Sumber: 2018 Theme Report MPAA

Gambar 2.4.

Pendapatan Bioskop Global dan Hiburan Film dari Rumah 2018 (pembagian %)



Sumber: 2018 Theme Report MPAA

Laporan dari MPAA tersebut menunjukkan adanya kenaikan secara berkala pada industri perfilman saat ini. Terutama dengan adanya *digital home entertainment* yang semakin mempermudah masyarakat untuk menikmati film dari manapun dan kapanpun. Namun dibalik besarnya pendapatan yang diperoleh industri tersebut, hanya sebagian studio film yang menguasai *box office* dan mendominasi kepemilikan pendapatan yang diperoleh. Seperti contoh dari 25 film teratas *box office US/Canada* 2018 yang hanya dikuasai oleh *the big six* anggota MPAA. Hal tersebut memunculkan fenomena oligopoli dalam industri film.

Douglas Gomery mendefinisikan oligopoli sebagai kompetisi yang dikontrol dengan hanya beberapa pemain. Gomery juga menyebutkan jika oligopoli merupakan struktur pasar yang sering dijumpai dalam kepemilikan media massa pada tahun 1990-an. Oligopoli memainkan peran dari sedikit pemain dalam pasar. mereka saling berbagi kepentingan satu sama lain dan saling menerima untuk dengan mudah membentuk suatu standar dan praktik yang mereka inginkan. Mereka membentuk kompetisi dipermukaan publik dengan menerima perusahaan independen yang ikut masuk dalam pasar industri film. Namun dengan strategi keuntungan maksimal dan resiko minimal pada akhirnya hanya mereka yang

menguasai keseluruhan dari apa yang diproduksi dan terjual dalam apa yang disebut *media marketplace* (Hall O. V., 2003).

b. Korporasi Industri Film Hollywood di Luar MPAA

Terdapat ratusan studio film yang ada di dalam industri film Hollywood, beberapa diantaranya yang telah dipaparkan sebelumnya yang merupakan studio film yang tergabung dalam MPAA. Anggota MPAA menguasai perfilman global. Namun tidak menutup kemungkinan jika film yang berasal dari studio di luar anggota MPAA juga dapat 'menembus' *box office*.

Legendary Entertainment merupakan salah satu studio baru di Amerika Serikat. Studio yang didirikan pada tahun 2000 tersebut memiliki tiga film terlaris yaitu Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) dengan pendapatan 1,3 miliar dollar AS; Kong: Skull Island (2017) dengan pendapatan 561 juta dollar AS; Pokemon: Detective Pikachu (2019) dengan pendapatan 432,7 juta dollar AS. Pada tahun 2019, pendapat yang dicapai Legendary Entertainment sebesar 5 miliar dolar AS, serta kinerja *box office* yang mencapai 16,2 miliar dollar AS. Studio film ini seringkali bekerjasama dengan studio-studio lain seperti Warner Bros dan Universal Pictures (Wahyono, 2020).

Berikutnya adalah Relativity Media yang didirikan pada tahun 2004. Studio ini memiliki 3 film terlaris yaitu Fast and Furious 6 (2013) dengan pendapatan 789,3 juta dollar AS, Hancock (2008) dengan pendapatan 624,2 juta dollar AS, dan yang terakhir film Les Misérables (2012) dengan total pendapatan 438,4 juta dollar AS. Film yang diproduksi oleh Relativity Media telah mendapat total *box office* sebesar 15,3 miliar dollar AS dan menjadikannya studio film terbesar ke-10 di dunia berdasarkan angka *box office* (Wahyono, 2020).

Masih banyak studio film lain seperti Genesis Orlando, Hollywood Pictures, United Artists, Columbia Pictures, Touchstone Pictures, dan lain sebagainya. Namun berbagai studio film tersebut kebanyakan tetap bernaung dibawah studio film besar. Terdapat juga studio film yang dinaungi oleh studio besar seperti contohnya Columbia Pictures yang berada dibawah naungan Sony Pictures (Sony, 2020). Kemudian Touchstone Pictures yang diluncurkan oleh Walt Disney Pictures

(DeKalb, 2020). Data-data tersebut membuktikan jika studio lain diluar MPAA juga dapat menembus box office. Namun fakta lain juga ditemukan jika banyak studio film yang berada dibawah naungan atau bekerjasama dalam produksi hingga distribusi film dengan studio besar anggota MPAA.



BAB III BENTUK BANTUAN AMERIKA SERIKAT KEPADA INDUSTRI FILM HOLLYWOOD

3.1 Fenomena yang terdapat dalam Industri Film Hollywood

BAB ini akan menganalisis mengenai bentuk-bentuk bantuan yang didapatkan oleh industri film Hollywood. Pihak yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk memberikan bantuan-bantuan yang dapat disebut sebagai hak istimewa tersebut diberikan oleh pemerintah AS. Pemerintah AS, dalam hal ini seperti pada BAB II telah dipaparkan, merupakan departemen luar negeri, departemen pertahanan, dan CIA yang memiliki pengaruh besar dan bisa jadi secara langsung berinteraksi dengan pihak korporasi film Hollywood.

Keuntungan yang diterima industri film Hollywood merupakan keuntungan yang tidak semua industri lain dapat mengaksesnya. Selain itu tidak semua judul film yang meminta bantuan kepada pihak pemerintah dapat diterima. Akses terhadap ruang privat AS, dalam hal ini yang menjadi utama adalah akses terhadap sumber daya militer merupakan hal yang bersifat rahasia dan dijaga ketat keamanannya. Namun dalam beberapa kasus, permintaan akses ke ruang privat pemerintah AS dan bantuan diberikan kepada industri film.

3.1.1 Oligopoli

Pembahasan dalam penelitian ini tidak lepas dari peran penting para aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah AS terhadap industri filmnya. Aktor-aktor tersebut sebelumnya telah dipaparkan dalam pembahasan BAB II dari sisi pemerintah AS maupun dari industri film AS yang diwakili oleh MPAA. MPAA hanya mewakili enam dari berbagai korporasi film lain yang ada di AS. Enam korporasi tersebut merupakan korporasi terbesar di AS.

MPAA telah melalui berbagai perubahan keanggotaan sejak awal berdiri. Namun pada dasarnya anggota-anggota dari MPAA adalah berbagai studio yang mendominasi industri film Hollywood. Dapat dibuktikan dengan dominasi keenam studio besar yang saat ini menjadi anggota MPAA yaitu: Universal Pictures,

Paramount Pictures, Walt Disney Studios, Sony Pictures, dan Warner Bros serta satu layanan *streaming* video Netflix. Pada tahun 2018 dua puluh lima film yang memiliki pendapatan *box office* tertinggi seluruhnya merupakan studio film anggota MPAA (Jenks, 2018), kecuali Netflix dan sebelum 20th Century Fox resmi diakuisisi Disney.

Industri film Hollywood sejak lama memiliki fenomena oligopoli di dalamnya. Oligopoli sendiri tidak jauh berbeda dari fenomena monopoli. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah pemain, dengan monopoli yang hanya memiliki satu pemain utama dan oligopoli memiliki beberapa pemain (Questibrilia, 2019). Efek yang ditimbulkan terhadap masyarakat juga cenderung sama yaitu jika dalam perekonomian keuntungan hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil pihak.

Jika diteliti lebih jauh awal fenomena oligopoli dapat terbentuk dalam industri film dimulai dengan melihat kebelakang pada saat industri film mulai berkembang terutama di AS. Pada tahun 1920-an berbagai studio film mengalami merger dan akuisisi secara bertahap hingga membentuk sistem oligopoli yang kuat. Kekuasaan industri film Hollywood juga didukung kelemahan Eropa yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama, sehingga banyak studio Hollywood memanfaatkan peluang tersebut untuk merebut pasar film Eropa. Berbagai studio besar Hollywood mengambil alih produksi film, distribusi, hingga ruang untuk mengoperasikan itu sendiri jadi fungsinya terintegrasi secara vertikal pada tahun 1900-an awal hingga pertengahan abad (Balio, 1985).

Paramount Pictures salah satu studio yang terintegrasi secara vertikal. Akibatnya reputasi Paramount meningkat dan menjadi “studio bintang” sepanjang tahun 1930-an, 1940-an, dan 1950-an. Namun kekuasaan Paramount tidak bisa dipertahankan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tahun 1948 yang melarang studio film menguasai kegiatan diluar produksi film (McKittrick, 2019).

Setelah melalui penurunan keuntungan yang besar, Paramount akhirnya dapat bangkit dengan membawa berbagai film komersial seperti *The Godfather* (1972), *Saturday Night Fever* (1977), *Grease* (1978), *Top Gun* (1986), *Ghost* (1990), dan serial *Indiana Jones* dan *Star Trek*. Waralaba lain yang juga mendapat keuntungan besar adalah termasuk *Transformers*, *Iron Man* (dua film pertama),

Mission: Impossible, *Friday the 13th* (delapan film pertama), dan *Beverly Hills Cop* (McKittrick, 2019). Dengan membawa berbagai serial komersial yang mendapat banyak keuntungan, Paramount menjadi studio besar yang keunggulannya sulit untuk ditembus pesaing kecil, walaupun pada saat ini integrasi vertikal sudah banyak berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu Walt Disney Studios juga menjadi salah satu studio terbesar Hollywood. Berawal dari kesuksesan karakter kartun Mickey Mouse Walt Disney yang mampu berkembang pesat hingga dapat merilis live-action pada tahun 1940-an. Kerajaan media Disney terus berkembang dengan mendirikan taman hiburan yang terkenal dengan atraksi berdasarkan studio film. Disney tidak berhenti pada dunia karakter kartun, melainkan terus berkembang dengan merilis film yang lebih dewasa dibawah Touchstone Pictures dan Miramax. Hingga beberapa tahun terakhir Disney mengakuisisi Pixar (2006), Marvel Studios (2009) dan Lucasfilm (2012) yang semakin menambah kesuksesan Disney (McKittrick, 2019). Terakhir Disney juga telah resmi mengakuisisi 20th Century Fox yang merupakan waralaba besar di Hollywood.

Dalam pasar oligopoli, cenderung tidak ada kekuatan dominan. Karena penetapan harga yang ada dalam didalamnya saling bersaing. Ketika satu perusahaan menetapkan harga, yang lain akan melakukan hal yang sama agar tetap kompetitif. Ketika satu perusahaan menurunkan harga, perusahaan yang lain juga akan cenderung mengikuti. Namun karena pelaku dalam pasar oligopoli sedikit, harga-harga biasanya lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Dalam hal ini, karena tidak ada kekuatan dominan, perusahaan biasanya berkolusi satu sama lain dibandingkan bersaing. Tujuannya adalah menghalangi pemain lain memasuki pasar. Jika mereka tidak berkolusi, maka akan terpaksa untuk membuka pasar bagi perusahaan yang lebih kecil. Kerjasama ini membuat mereka beroperasi seolah-olah satu perusahaan. Struktur pasar menjadi monopoli, karena tidak adanya struktur pasar tertentu dalam oligopoli yang seharusnya ada (Hall M. , 2019).

Dalam industri film Hollywood, fenomena pasar oligopoli yang terjadi sama dengan yang sebelumnya telah dipaparkan. Studio besar cenderung berkolusi satu sama lain untuk menciptakan pasar oligopoli yang stabil bagi anggotanya. Oleh

karena itu adanya MPAA dengan para anggotanya antara lain: Universal Pictures, Paramount Pictures, Walt Disney Studios, Sony Pictures, dan Warner Bros serta satu layanan *streaming* video Netflix, mewadahi studio film besar AS tersebut untuk bekerjasama.

Salah satu aspek yang nantinya membuktikan fenomena propaganda yang terdapat dalam industri film Hollywood adalah oligopoli. Fenomena oligopoli dalam industri film Hollywood dapat mengakibatkan pihak baru selain studio besar Hollywood sulit untuk masuk ke dalam pasar. Citra studio besar sudah sejak lama dibangun dan kualitasnya tidak diragukan lagi oleh konsumen. Hal tersebut memang merupakan salah satu ciri-ciri pasar oligopoli (Questibrilia, 2019). Akibatnya, studio kecil yang sedang dan akan berkembang akan sulit untuk menembus dominasi studio besar di Hollywood. Oligopoli maupun monopoli merupakan hal yang legal di AS, kecuali dapat dibuktikan bahwa sebuah perusahaan mencoba untuk menahan jalannya perdagangan yang sesuai aturan (Hall M. , 2019).

3.1.2 Bantuan oleh Pemerintah AS

Subsidi atau bantuan yang diterima industri film Hollywood didapatkan dengan cara yang tidak kompetitif. Bukti-bukti dalam beberapa penelitian juga mengungkapkan jika permintaan produser film kepada pemerintah ditentukan oleh isi cerita yang ada dalam naskah film. Jika dalam film tersebut memberikan pencitraan yang baik kepada pemerintah AS maka film tersebut akan diterima. Pemerintah juga berusaha untuk ikut dalam pengubahan naskah film. Sebaliknya jika produser film menolak permintaan pemerintah maka permintaan bantuan akan ditolak. Hal tersebut memunculkan kontrak yang tidak kompetitif dalam industri film Hollywood.

Bantuan-bantuan yang diberikan dalam bentuk akses pada ruang privat pemerintah atau sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah. Pada dasarnya semua sumber daya tersebut bukan milik departemen pertahanan melainkan milik masyarakat AS dan seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan departemen pertahanan yang dapat merugikan masyarakat. Karena

pada saat pemberian bantuan, pemerintah berupaya untuk menjadikan film sebagai alat untuk kepentingan pihak tertentu. Produser film tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan mengutarakan opininya pada film tersebut. Masyarakat yang akan menjadi penikmat film juga akan dirugikan karena tidak mendapatkan kualitas film yang maksimal karena terbatasnya kreatifitas produser.

Kontrak yang tidak kompetitif akan merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan elit yang dominan dalam industri tersebut. Pemerintah mendapatkan media yang dapat dengan mudah memberikan pengaruhnya kepada masyarakat. Produser film mendapatkan keuntungan dengan penghematan biaya properti dan pendampingan dari sisi pemerintah. Sedangkan masyarakat hanya akan mendapat film dengan tingkat orisinalitas, kreatifitas dan keberagaman yang rendah. Subsidi atau bantuan yang diberikan pemerintah AS untuk industri film sebagian besar bukan dalam bentuk uang. Melainkan dalam bentuk lain yang dapat dianggap 'lumrah' karena mereka tidak sadar dengan adanya pemberian bantuan tersebut. Hal tersebut terjadi salah satunya, karena yang diberikan bukan bantuan pendanaan. Bantuan-bantuan yang telah dirangkum dari berbagai sumber dan dokumen antara lain berjenis:

- Pembuatan naskah dan dialog oleh tokoh ahli pemerintah AS
- Pemberian perlengkapan *wardrobe*
- Pendampingan produksi oleh tokoh ahli pemerintah AS
- Ekstras atau orang tambahan yang ikut mendapat peran utama atau peran pendamping dari pemerintah AS. Biasanya ekstras tersebut untuk tokoh khusus seperti pilot atau penerbang pesawat hingga tentara untuk menjadi pemain tambahan
- Peminjaman kendaraan militer, seperti pesawat terbang, pesawat tempur, helikopter, kapal, tank, mobil, dan lain-lain
- Peminjaman alat-alat militer seperti alat perang, senjata api, dan lain-lain
- Bantuan perizinan lokasi pengambilan gambar di lokasi privat AS

3.2 Film yang Mendapat Bantuan dari Amerika Serikat

Keterlibatan pemerintah AS dalam industri film Hollywood dapat dilihat dari ratusan judul film yang berhasil dikumpulkan dari berbagai media dan penelitian sebelumnya. Terdapat berbagai daftar film yang diterbitkan, salah satunya adalah daftar film dari departemen pertahanan yang dicantumkan dalam Tabel 3.1 (Secker, 2020). Isi dari laporan tersebut adalah mengenai judul-judul film yang diajukan untuk mendapat bantuan kepada departemen pertahanan, bantuan yang diberikan, dan status film tersebut diterima atau ditolak. Contohnya adalah film *Iron Man 1* yang diproduksi oleh Marvel Studio (Disney) yang disetujui oleh departemen pertahanan dan mendapat bantuan perlengkapan militer dan anggota militer untuk menjadi pemain tambahan.

Selain itu, departemen pertahanan merupakan salah satu pihak dari pemerintah AS yang berhubungan langsung dengan Hollywood. Hubungan tersebut diketahui menghasilkan ratusan film seperti contohnya telah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

Daftar Film yang Mendapatkan Bantuan dari Departemen Pertahanan AS (Tahun 1933-2009)

No	Judul (Tanggal Rilis)	Perusahaan Produksi	Catatan
1	Major Movie Star (07-11-2008)	(Independent)	Pendampingan disetujui oleh departemen pertahanan. Disetujui untuk pengambilan gambar di kamp <i>national guard</i> Minden, LA dalam 20 hari. Termasuk kendaraan militer (truk <i>humvees</i> , dll) dan operator, tentara yang tidak bertugas, akses kepada area pelatihan seperti <i>Bayonet Assault Course</i> .
2	Tugger (15-7-2005)	Genesis Orlando	Surat disetujui. Disetujui bantuan non-produksi (saran teknis, stock footage, penelitian, wawancara, dll). Film animasi anak-anak dengan fitur badai petir USAF.
3	Flags of Our Father (16-10-2006)	Malpaso Production	Surat DoD disetujui. Pendampingan disetujui. Bantuan sangat sederhana disediakan. Satu kendaraan vintage USMC serangan amfibi dan penasehat teknis sejarah disediakan untuk difilmkan di Iceland. USMC ekstras untuk pembukaan dedikasi memorial di DC disediakan.
4	The Messenger (01-01-2009)	All the Kings Horses, Llc	Surat disetujui untuk pendampingan produksi. Setuju untuk membuat film dalam beberapa hari di Fort Dix, NJ. Di halaman interior dan eksterior. Termasuk tentara, kendaraan transportasi dan pengemudi. Sekitar 100 tentara yang tidak bertugas sebagai ekstras berbayar, dan unit foto kedua kegiatan militer rutin di instalasi
5	Three Wishes (03-11-1995)	Rysher Entertainment	SAAV menulis surat persetujuan pendampingan militer. Film selesai dalam satu hari. Film selesai dengan sukses. Perusahaan usul untuk menggunakan Fort MacArthur (USAF) di area LA sebagai rumah sakit Andrews AFB sebagai latar belakang untuk adegan anak perwira angkatan udara MIA yang sedang dirawat.

			Penggambaran militer akurat dan positif, pemikiran dalam film tidak ada hubungannya dengan militer.
6	The Perez Family (01-01-1995)	Perez Prod./ Samuel Goldwyn Company	<p>SAAV menandatangani surat persetujuan pendampingan.</p> <p>Sebagian besar latar belakang, tetapi penting untuk cerita. Positif, penggambaran akurat. Tidak ada file.</p> <p>Permintaan untuk menggunakan penjaga nasional Florida untuk mengaktifkan kembali bantuan kemusiaan yang mereka berikan (termasuk tenda dan truk) kepada pengungsi kuba selama Eksodus Mariel. 12 hari pengambilan gambar.</p>
7	Iron Man I (02-05-2008)	Marvel Studio/ Disney	<p>Departemen pertahanan menandatangani surat. Pendampingan disetujui.</p> <p>Disetujui pengambilan gambar di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, CA, terutama di jalur penerbangan dengan pesawat C-17, F-22, dan <i>Global Hawk Aircraft</i>, kendaraan dan ekstras tentara militer sebagai latar belakang area <i>Marine Corps</i>.</p>
8	Guarding Tess (11-03-1994)	On Guard Prods/ Tri-Star	<p>Pertama pengajuan bantuan ditolak karena menggunakan unsur militer namun terlihat tidak realistis. Kemudian berdasarkan masukan dari Counterparts di FBI dan layanan rahasia (keduanya menyediakan pendampingan), lalu diputuskan untuk disetujui.</p> <p>Ditandatangani surat produksi dan pendampingan asistensi.</p> <p>Adegan evakuasi (dua malam pengambilan gambar) setelah <i>The Black Hawk</i>.</p> <p>Menggunakan helikopter MD tentara nasional untuk memeriksakan kesehatan. Perusahaan yang membayar seluruh pengeluaran militer.</p> <p>Perusahaan melakukan adegan kedatangan dengan Ang Hanggar dan pesawat terbang di latar belakang. Disarankan jika mereka pergi menggunakan sebuah helikopter sewaan sipil terbaru, akhirnya menggunakan NG helikopter untuk adegan evakuasi malam hari. Membayar semua pengeluaran.</p>
9	Camp Nowhere	Hollywood Pictures	Cerita tentang anak-anak yang diundang dalam kamp musim panas palsu milik mereka

	(01-01-1994)		sendiri. Perusahaan ingin beberapa jet militer untuk diterbangkan.
10	Wild America (02-06-1997)	Morgan Creek/Warner Bros	SAAV menyetujui untuk pendampingan (bagaimanapun, hal itu sedikit dibatasi). Pada dasarnya bukan film militer, dengan sedikit adegan yang bertempat di rumah sakit militer, namun dengan alasan yang akurat dan positif.
11	Contact (14-07-1997)	Warner Bros	SAAV menyetujui pendampingan militer. Awalnya cukup banyak penggambaran militer yang konyol. Negosiasi peradaban dalam hampir semua bagian militer. Penggambaran militer minimal, tetapi positif. Setuju untuk menggunakan kendaraan dan helikopter untuk penjaga nasional.
12	Tears of the Sun: Hostle Rescue (01-01-2003)	Hostle Rescue Productions, Inc	Setelah negosiasi naskah yang panjang, sebagian besar untuk meningkatkan realisme militer di antara anggota tim member dan antara tim dan otoritas yang lebih tinggi. Juga untuk mencegah pemerintah AS sebagai pihak yang terlibat dalam konspirasi buruk luar negeri. Disetujui pengambilan gambar di Hawaii dengan helikopter angkatan laut. Pendampingan juga ternasuj pengambilan gambar sebuah tim terjun payung (Kalifornia Selatan) dan pengambilan gambar helikopter beroperasi di atas kapal (perairan di dekat San Diego).
13	Sum of All Fears: The Sum of All Fears (01-01-2002)	Pramount Pictures	Meminta USMC untuk ekstras tanpa senjata, saran teknologi, dan dua pesawat terbang CH-53E. Pendampingan di Montreal dan dua helikopter tentara CH-60, perlengkapan bantuan bencana tentara, dan ekstras militer. Permintaan untuk penasehat teknologi disetujui USAF, OFFUTT AFB, Nebraska. Meminta izin untuk mengambil gambar pesawat udara NAOC dalam penerbangan oleh KC-10. Meminta izin untuk mengambil gambar pesawat udara B-2 dan F-16 ketika terbang, di daratan dan <i>take off</i> . Tambahan, produser film meminta persetujuan departemen pertahanan menyetujui pengambilan gambar dekat Montreal, Kanada dengan dua korps marinir CH-53 dan dua helikopter tentara CH-60, perlengkapan

			bencana alam milik tentara sebagai ekstras militer. Disana merupakan pengambilan gambar kedua di San Diego, CA yang melakukan tambahan urutan militer dengan baik.
14	In The Army Now (15-08-1994)	Hollywood Pictures	SAAV menyetujui untuk pendampingan. Kontak awal dengan tentara. Cerita mengenai komedi mengenai seseorang spesialis pemurnian air cadangan untuk tentara dan akhirnya mendapat panggilan untuk tugas aktif. Perusahaan meminta untuk menggunakan situs cadangan tentara, helikopter, kendaraan, ekstras untuk produksi.
15	X-15 (15-11-1961)	United Artists	Disetujui untuk pendampingan, data perpustakaan Georgetown. Airforce dan NASA menyediakan kerjasama penuh dalam drama dokumenter tentang program X-15
16	Deja Vu (22-11-2006)	Jerry Bruckheimer Films	Departemen pertahanan menandatangani surat persetujuan. Pendampingan disetujui. Disetujui pengambilan gambar di sekitar aktivitas pendukung angkatan laut di Algiers, Louisiana untuk beberapa hari. Ekstras angkatan laut berpartisipasi menjadi penumpang di atas kapal Ferry.
17	Major Movie Star (11-05-1999)	(Independent)	Departemen pertahanan menandatangani surat persetujuan. Pendampingan disetujui. Disetujui pengambilan gambar di kamp Minden, LA (situs nasional tentara) untuk 20 hari. Berbagai kendaraan digunakan, pengambilan gambar di beberapa lokasi, termasuk <i>Bayonet Assault Course</i> . Sekitar 10 tentara beroperasi dan memastikan perlengkapan. Termasuk adanya ekstras latar belakang tentara sebagai prajurit yang ikut berpartisipasi.
18	Transformers: Revenge of The Fallen (24-06-2009)	Dreamworks/Pramount Pictures	Departemen pertahanan memberikan dukungan.
19	Clear and Present Danger	Neufeld-Rehme Production	Meminta pesawat terbang, kapal, dan lokasi. Setelah periode yang diperpanjang dalam negosiasi naskah, pendampingan disetujui.

	(03-08-1994)		Menggunakan pesawat terbang untuk meluncurkan serangan.
20	Above The Clouds (09-01-1934)	Columbia	Disetujui untuk pendampingan. Angkatan laut menggunakan kapal perang, kapal selam dan balon udara sebagai latar belakang cerita.
21	The American President (06-11-1995)	Castle Rock	SAAV menyetujui permintaan pendampingan militer. Perusahaan produksi meminta musikus kelautan untuk menggambarkan band kelautan, pendampingan teknis, ekstras, untuk menetapkan fungsi sosial gedung putih dan untuk memastikan penggambaran militer lainnya secara positif dan akurat.
22	Ace of Aces (14-11-1933)	RKO	Korporasi angkatan udara menyediakan pesawat untuk adegan pertempuran udara dalam Perang Dunia I di Perancis. Disetujui untuk pendampingan.
23	Armageddon (01-01-1998)	Touchstone Pictures	Disetujui untuk menggunakan lokasi USAF dan helikopter. SAAV menyetujui untuk melakukan pendampingan.

Sumber: spyculture.com/roi-does-the-pentagon-fund-movies/

Data tersebut merupakan sebagian kecil dari dokumen keterlibatan Departemen Pertahanan dalam produksi film Hollywood. Film-film yang terdapat dalam data tersebut rata-rata memiliki tahun dibawah 2010. Data setelah tahun tersebut tidak mudah untuk ditemukan. Karena dokumen milik Pemerintah AS terutama departemen pertahanan dan CIA merupakan dokumen yang bersifat rahasia.

Dalam data yang diunggah oleh Tom Secker terdapat ratusan jenis film dan serial televisi yang meminta bantuan pada Departemen Pertahanan AS. Namun tidak semua permintaan bantuan tersebut disetujui. Terdapat juga film yang disetujui bantuannya namun dengan berbagai syarat pada catatan dokumen tersebut.

Penelitian ini lebih fokus pada data-data film, sehingga serial televisi tidak dilampirkan dalam contoh data. Namun pada dasarnya, prinsip media film dan serial televisi hampir sama. Sehingga hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan penelitian dengan contoh kasus dari serial televisi.

3.3 Film yang Permintaan Bantuannya Ditolak oleh Amerika Serikat

Jika terdapat ratusan film yang permintaan bantuannya diterima oleh pemerintah AS, maka tidak sedikit juga film yang mengalami penolakan dalam usahanya untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam memproduksi film. Data-data yang ditemukan menunjukkan jika film-film yang mendapat penolakan adalah film yang memiliki naskah atau jalan cerita yang berlawanan dari citra yang ingin dibangun pemerintah AS. Kemudian pihak produser film juga menolak adanya timbal balik permintaan yang diperintahkan oleh pihak AS.

Data film yang terdapat dalam dokumen film-film yang meminta bantuan dari Departemen Pertahanan AS tidak hanya yang berhasil disetujui untuk mendapat bantuan, namun terdapat juga judul-judul film serta serial televisi yang tidak mendapatkan bantuan atau ditolak permintaan bantuannya oleh departemen pertahanan. *Terminator 3: Rise of The Machines* (2003) merupakan salah satu film yang mendapat penolakan. Permintaan ditujukan pada pangkalan udara Edwards, Kalifornia untuk satu hari pengambilan gambar dengan latar belakang pesawat udara yang tidak terbang. Pada saat pengajuan awal bantuan tersebut, naskah yang ditunjukkan kepada pihak departemen pertahanan memiliki salah satu tokoh jenderal yang digambarkan baik yang secara tidak sengaja bertanggungjawab pada keadaan tidak menguntungkan yang menyebabkan bencana nuklir. Namun kemudian, sutradara film tersebut yaitu Jonathan Mostow, menulis ulang karakter jenderal sebagai karakter yang bertolak belakang dari sebelumnya. Sehingga, pihak departemen pertahanan memberikan syarat agar karakter tersebut dikembalikan seperti naskah awal. Beberapa waktu kemudian, kantor pangkalan udara LA memberitahukan jika sutradara Jonathan tidak melakukan perubahan yang diperintahkan, sehingga permintaan bantuan juga tidak dikabulkan (Secker, 2020).

Contoh film berikutnya yang terdapat dalam dokumen adalah *Outbreak* (1995). Produser film meminta bantuan pendampingan militer, termasuk pesawat tempur dan kendaraanya. Dalam film tersebut banyak penggambaran fundamental yang buruk terhadap pihak militer AS, dan produser film tidak memiliki kemauan untuk membuat perubahan dalam hal itu. Sehingga permintaan bantuan ditolak.

Film berikutnya adalah JAG: Ready Or Not (2002). Permintaan pengambilan gambar di pangkalan militer ditolak, karena premis dasar film (*court martial* melanggar aturan dalam latihan) tersebut tidak nyata. Serta dua pemeran utama sebagai dua jenderal angkatan darat dan angkatan laut digambarkan sebagai tokoh yang negatif. Walaupun pada akhirnya jenderal angkatan laut menjadi pahlawan yang tidak konvensional. Film berikutnya adalah Blue Thunder (1983) yang ditolak oleh angkatan darat AS dalam pengambilan gambar di Vietnam. Karena adanya adegan seorang Viet Cong dilempar dari helikopter. Penolakan selanjutnya juga ada pada film Broken Arrow (1998), karena bercerita mengenai pilot angkatan udara yang mencuri dua senjata nuklir lalu dijual pada penawar tertinggi. Hingga terdapat juga judul film yang gagal diproduksi dan ditayangkan karena adanya penolakan tersebut. Film tersebut berjudul Code Name: Delta Force. Dalam catatan dokumen departemen pertahanan, film tersebut digambarkan tidak akurat dan pemain sebagai pemerintah AS, departemen pertahanan, dan pasukan operasi khusus ada dalam peran yang tidak menguntungkan (Secker, 2020).

Berbagai contoh data tersebut merupakan bukti adanya penolakan permintaan bantuan yang diambil dari data yang dikeluarkan oleh Tom Secker seperti pada subbab 3.3. Data yang dipaparkan sebelumnya merupakan sebagian kecil dari ratusan film serta serial televisi yang bantuan permintaannya ditolak oleh Pemerintah AS. Terdapat berbagai macam alasan dari penolakan permintaan bantuan tersebut. Dapat disimpulkan jika sebagian besar penolakan terjadi jika film tidak menerima masukan dari Pemerintah AS, seperti permintaan adanya perubahan naskah. Selain itu, jika film tersebut tidak menggambarkan citra pemerintah khususnya Departemen Pertahanan AS dengan baik, maka film tersebut akan ditolak permintaannya.

BAB V KESIMPULAN

Industri film Hollywood telah berkembang pesat sejak awal kemunculannya. Hollywood telah menciptakan puluhan ribu lebih film yang dinikmati masyarakat dunia. Sejak lama Hollywood menguasai perfilman dunia dan menciptakan ribuan judul film yang menjadi *box office* dunia. Film merupakan media yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Karena film memang dikemas secara menarik dengan berbagai plot cerita dan visualisasi yang mudah diterima.

Daya tarik film Hollywood tidak hanya ada pada film itu, tetapi pada faktor luar film. Dalam industrinya, Hollywood dikuasai oleh lima studio film utama Amerika Serikat (Universal Pictures, Paramount Pictures, Walt Disney Studios, Sony Pictures, dan Warner Bros) dan layanan streaming video Netflix. Fenomena oligopoli muncul di dalam industri film Hollywood. Fenomena ini menjadi salah satu daya tarik Hollywood sehingga mendapat bantuan dari Pemerintah AS.

Bantuan yang diberikan Pemerintah AS dalam bentuk pembuatan naskah dan dialog oleh tokoh ahli Pemerintah AS, pemberian perlengkapan, pendampingan produksi oleh tokoh ahli, ekstras atau orang tambahan yang juga ahli pada bidangnya, peminjaman kendaraan militer, peminjaman alat militer, perizinan lokasi, hingga akses pada ruang privat pemerintahan yang dibutuhkan oleh produser film. Dalam hal ini, industri film Hollywood menjadi alat untuk kepentingan Pemerintah AS dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Industri film Hollywood tunduk pada model propaganda yang dilakukan Pemerintah AS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan jika alasan pemerintah AS memberikan bantuan terhadap industri film Hollywood yang pertama sebagai media iklan produk dalam negeri AS. Kedua, sebagai alat untuk mempertahankan citra baik AS. Terakhir adalah sebagai alat penyebaran ideologi AS pada dunia global. Ketiga alasan tersebut merupakan propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah AS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariansah, Mohamad. 2014. *Gerakan Sinema Dunia: Bentuk, Gaya, dan Pengaruh*. Jakarta: FFTV IKJ.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Hall, Onald V. Bettig and Jeanne Lynn. 2003. *Big Media, Big Money*. Maryland: Rowman & Littlefield Published, Inc.
- Hardy, Jonathan. 2014. *Critical Political Economy of the Media: an Introduction*. New York: Routledge.
- Herman, Edward S., dan Noam Chomsky. 1988. *Manufacturing Consent*. New York: Pantheon Books.
- . 1988. *Manufacturing Consent*. New York: Pantheon Books.
- Howard-Hamilton, T.L. Robinson & M. F. 2000. *The Convergence of Race, Ethnicity and Gender: Multiple identities in Counseling*. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
- Jenkins, Tricia. 2012. *The CIA in Hollywood: how the agency shapes film and television*. Texas: University of Texas Press.
- Kellner, Douglas. 1996. *Media Culture, Identity, and Politics between Modern and Postmodern*. New York: Routhledge.
- Oatley, Thomas. 2012. *International Political Economy*. 5. California: University of North California Chapel Hill.
- Robb, David L. 2004. *Operation Hollywood: How The Pentagon Shapes and Censors The Movie*. New York: Prometheus Books.

Jurnal

- Alford, Matthew. 2009. "A Propaganda Model for Hollywood." *Westminster Papers in Communication and Culture, University of Wesminster Vol. 6(2): 144-156. ISSN 1744-6708 (Print) 147*.
- Balio, Tino. 1985. "The American Film Industry." Madison: University of Wisconsin Press.
- Hiariej, Eric. 2003. "Teori Negara Marxis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 261-282.

- Rosefielde, Steven, dan D. Quinn Mills. 2007. "Masters of Illusions: American Leadership in the Media Age." Dalam *Masters of Illusions: American Leadership in the Media Age*, oleh Steven Rosefielde and D. Quinn Mills, 133. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Moody, Paul. 2017. "Embassy Support for Hollywood's Global Dominance: Cultural Imperialism Redux." *International Journal of Communication* 1.
- Rasul, Azmat. 2015. "Filtered Violence: Propaganda Model and Political Economy of the Indian Film Industry." *Journal of Media Critiques* 75-92.
- Sudibyoy, Agus. 2000. "Absennya Kajian Ekonomi Politik Media di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UGM* 115-134.
- Secker, Tom, dan Matthew Alford. 2017. "National Security Cinema: The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood." Dalam *National Security Cinema: The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood*, oleh Tom Secker and Mathew Alford, 59-60. Drum Roll Books.

Skripsi

- Sefa, MA. Faisal Datu. 2017. "Propaganda Demokrasi Amerika Serikat Melalui Film Komedi (Studi Analisis Isi Film The Dictactor)." Malang, Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Malang, 26 May.

Laporan

- Jenks, Julia. 2018. *2018 Theme Report: A Comprehensive Analysis and Survey of the Theatrical and Home Entertainment Market Environment for 2018*. Motion Picture Association of America.
- Ruane, Kathleen Ann. 2014. *Freedom of Speech and Press: Exceptions to the First Amandement*. Report for Congress, Congressional Research Service.

Berita Media Online

- Bremmer, Ian. 2015. *These Are the 5 Reasons Why the U.S. Remains the World's Only Superpower*. <https://time.com/3899972/us-superpower-status-military/>. Diakses pada 20 Oktober 2019.
- Riantrisantono, Ruly. 2020. *Film Transformers Bakal Ada Seri Ketujuh, Optimus Prime Tewas?* 26 Mei. <http://m.liputan6.com/showbiz/read/4263333/film-transformers-bakal-ada-seri-ketujuh-optimus-prime-tewas>. Diakses pada 10 Agustus 2020.

Rosalia, Indra. 2019. *Dampak Akuisisi Disney terhadap Fox*. 23 Maret. <https://beritagar.id/artikel-amp/berita/dampak-akuisisi-disney-terhadap-fox>. Diakses pada 15 Juli 2020.

Wibisono, Nuran. 2018. *Hollywood Siap Memamah Pasar Asia*. 18 Januari. <https://tirto.id/hollywood-siap-memamah-pasar-asia-cDo5>. Diakses pada 02 Februari 2020.

Artikel Internet

Aichinger, Alex. 2009. *Rosenberger v. Rectors and Visitors of the University of Virginia (1995)*. <http://www.mtsu.edu/first-amendment/article/315/rosenberger-v-rectors-and-visitors-of-the-university-of-virginia>. Diakses 21 Februari 2020.

Aida, Nur Rohmi. 2019. *Mengenal Rating Film, Apa Itu R, G, PG, hingga NC-17 agar Tak Salah Tonton*. 05 Oktober. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/05/164825265/mengenal-rating-film-apa-itu-r-g-pg-hingga-nc-17-agar-tak-salah-tonton?page=all>. Diakses 5 Januari 2020.

Alford, Matthew. 2017. *Washington DC's Role behind the Scenes in Hollywood goes Deeper than You Think*. 3 September. <https://www.independent.co.uk/voices/hollywood-cia-washington-dc-films-fbi-24-intervening-close-relationship-a7918191.html>. Diakses 09 Desember 2019.

Britannica, The Editors of Encyclopedia. 2019. *Motion Picture Association of America*. 03 November. <https://www.britannica.com/topic/Motion-Picture-Association-of-America>. Diakses 5 Januari 2020.

Collins. t.thn. *Box Office*. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box-office>. Diakses 14 Oktober 2019.

Corrigan, Kevin "Crash". 2012. *Bumblebee from the Transformers*. 10 January. <http://www.google.com/amp/s/www.auto123.com/en/news/amp/bumblebee-from-the-transformers/28212/>. Diakses 21 Agustus 2020.

Hall, Mary. 2019. *Monopoly vs. Oligopoly: What's the Difference*. 29 September. <https://www.investopedia.com/ask/answers/121514/what-are-major-differences-between-monopoly-and-oligopoly.asp>. Diakses 28 Agustus 2020.

History.com, Editor. 2018. *Hollywood*. 21 Agustus. https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev

- =search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.history.com/topics/roaring-twenties/hollywood&xid=25657,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,1570. Diakses 21 Januari 2020
- Kugel, Herb. 2017. *Hollywood's Dream Factory During World War II*. 27 Juli. <https://warfarehistorynetwork.com/2016/07/27/hollywoods-dream-factory-during-world-war-ii/>. Diakses 05 Juli 2020
- McKittrick, Christopher. 2019. *The History of Hollywood's Major Movie Studios*. 09 Februari. <https://www.liveabout.com/bix-six-movie-studios-4151130>. Diakses 05 Juli 2020.
- Mullich, David. 2018. *What Makes a Movie a Hollywood Movie?* 27 Januari. <https://www.quora.com/What-makes-a-movie-a-hollywood-movie>. Diakses 05 Juli 2020.
- Questibrilia, Bivisyani. 2019. *Pasar Persaingan Tidak Sempurna: Definisi, Jenis-jenis dan Ciri-cirinya*. 23 Juli. <https://jojonomic.com>. Diakses 28 Agustus 2020.
- Rizal. 2017. *5 Fakta Militer Amerika ini Membuat Negara Lain Mikir 1000 Kali Sebelum Menyerang*. 11 April. <https://www.boombastis.com/fakta-militer-amerika/65026>. Diakses 15 Oktober 2019.
- Roos, Dave. 2012. *How the MPAA Works*. 26 November. <https://entertainment.howstuffworks.com/mpaa.htm>. Diakses 05 Februari 2020.
- Sawe, Benjamin Elisha. 2017. *The Biggest Industries In The United States*. 1 Agustus. <https://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-biggest-industries-in-the-united-states.html>. Diakses 05 Februari 2020.
- Scott, Allen J. 2002. *Hollywood in the Era of Globalization*. <https://yaleglobal.yale.edu/content/hollywood-era-globalization>. Diakses 30 November 2019.
- Secker, Tom. 2020. *ROI: Does the Pentagon Fund Movies*. spyculture.com/roi-does-the-pentagon-fund-movies/. Diakses 05 Februari 2020.
- . 2020. *The Pentagon and The Worlds Biggest Film Franchises*. <http://www.spy.culture.com/the-pentagon-and-the-worlds-biggest-film-franchises/>. Diakses 05 Februari 2020.
- . 2020. *Updated "Complete" List of DOD Films*. <https://www.spyculture.com/updated-complete-list-of-dod-films/>. Diakses 05 Februari 2020.

Secker, Tom, dan Matthew Alford. 2017. *Documents Expose How Hollywood Promotes War on Behalf of the Pentagon CIA and NSA*. <https://www.globalresearch.ca/documents-expose-how-hollywood-promotes-war-on-behalf-of-the-pentagon-cia-and-nsa/5597891>. Diakses 06 Desember 2019.

Sony. 2020. *Divisions*. <https://www.sonypictures.com/corp/divisions.html>. Diakses 4 November 2020.

Smith, Bruce Lannes. 2020. *Propaganda*. 20 Maret. <https://www.britannica.com/topic/propaganda>. Diakses 10 Agustus 2020.

Weisman, Aly. 2014. *One Man In The Departement Of Defense Controls All of Hollywood's Access To The Military*. 5 Maret. <https://www.google.com.amp/s/www.businessinsider.com/phil-strub-controls-hollywood-military-access-2014-3%3famp>. Diakses 17 Juli 2020.

Wahyono. 2020. *Hegemoni Rumah Produksi Film Hollywood*. 6 September. <https://lifestyle.sindonews.com/read/154230/158/hegemoni-rumah-produksi-film-hollywood-1599206989?showpage=all>. Diakses 4 November 2020.